

**TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU PADA TAMAN PALA
TAPAKTUAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Reza Kamal

NIM: 210802133

**Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**



**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 1447 H/2026 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Kamal
Tempat Tanggal Lahir : Rantau Binuang/04 Mei 2003

NIM : 210802133

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 15 Januari 2026
Saya yang menyatakan,



Reza Kamal
NIM.210802133

**TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU PADA TAMAN PALA
TAPAKTUAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Reza Kamal
NIM: 210802133

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197802032005041001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU PADA TAMAN PALA
TAPAKTUAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

**Reza Kamal
NIM: 210802133**

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari / Tanggal : Kamis., 22 Januari 2026 M

Banda Aceh

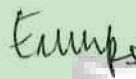
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197802032005041001

Sekretaris



Evi Yusnaini, S.AP
NIP.-

Penguji I,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIP. 199011192022031001

Penguji II,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIP. 197911172023212012

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Pala Tapaktuan
Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan
Nama/NIM : Reza Kamal/210802133
Pembimbing : Ferry Setiawan, S.E.,Ak.,M.Si
Kata Kunci : Tata Kelola RTH, Dinas Lingkungan Hidup

Pengelolaan ruang terbuka hijau pada Taman Pala seringkali menghadapi berbagai tantangan. Pemeliharaan fasilitas, kebersihan, keamanan, serta penataan ruang yang optimal memerlukan perhatian dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Observasi awal menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan keamanan di Taman Pala Tapaktuan. Beberapa fasilitas publik seperti area bermain anak, jalur pejalan kaki, dan penerangan jalan dalam kondisi kurang terpelihara, serta minimnya fasilitas pendukung seperti toilet, tempat sampah, dan sistem penanda (*sign system*) menjadi kendala bagian kenyamanan pengunjung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan dilakukan secara mingguan oleh Kepala Seksi Pertamanan dengan mengobservasi kondisi kebersihan, sarana prasarana, standar keamanan, dan pelayanan petugas. Pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap bulan dengan membandingkan target dan realisasi kegiatan, dibahas dalam rapat melibatkan pimpinan DLHK, dan dirumuskan rekomendasi tindak lanjut. Tindak lanjut evaluasi mekanisme tindak lanjut dilakukan melalui inventarisasi masalah, analisis solusi, penilaian ketersediaan anggaran, dan implementasi. Namun, implementasi sangat tergantung pada ketersediaan anggaran, sehingga banyak rekomendasi yang tertunda. Transparansi informasi tentang RTH Taman Pala dapat diakses melalui website DLHK dan Pemkab Aceh Selatan, dan tersedia saluran pengaduan publik. Partisipasi masyarakat terlibat melalui program gotong royong pembersihan, meskipun belum terstruktur secara berkelanjutan dengan jadwal rutin untuk mengelola RTH.

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “***Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Pala Tapaktuan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan***”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, *Alhamdulillah* peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Muazzinah, M.P.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si, selaku sekretaris prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Eka Januar, M.Soc.,Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
6. Ferry Setiawan, S.E.,Ak.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing tugas akhir

7. Segenap dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua, abang, kakak, dan keluarga dan sahabat tersayang terimakasih atas do'a, nasehat dan bimbingannya, serta kasih sayang yang selalu diberikan sehingga selesailah tugas akhir ini.

Banda Aceh, 15 Januari 2026

Reza Kamal
NIM. 231003039



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Fokus Penelitian	39
3.3 Lokasi Penelitian	40
3.4 Sumber Data	40
3.5 Informan Penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Teknik Analisis Data	45
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	46
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.2 Pelaksanaan pemeliharaan RTH di Taman pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan.....	50
4.3 Efektivitas Pembiayaan Pemeliharaan di Taman Pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan	56
4.4 Sistem Pemantauan Dan Evaluasi dalam Pengelolaan Taman Pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan	67
4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dihadapi oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan dalam Melaksanakan Tata Kelola RTH Taman Pala.....	74

BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran-Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3: Foto-Foto Pendukung Hasil Penelitian
- Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata ruang dan lingkungan hidup mengandung arti yang sangat luas karena kota yang baik merupakan kesatuan ruang yang direncanakan berdasarkan kebutuhan komponen penyusunan ruangnya, sehingga dapat menciptakan suasana kenyamanan dan kesehatan bagi warganya. Harus disadari bahwa perkembangan beberapa kawasan yang karena kondisi dan potensi yang dimiliki perlu perencanaan spesifik, baik dalam arah dan bentuk penataan ruang terbuka hijau.¹

Dengan demikian perkembangan RTH pada setiap kota perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan. Pada sisi lain perkembangan pemanfaatan ruang terbangun yang tidak terkendali dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka (khususnya RTH), akan berakibat pada semakin turunnya efisiensi penggunaan ruang dan lahan yang ada, dan kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan.

Kondisi pemanfaatan ruang terbangun yang tidak terkendali tersebut, jika dibiarkan terakumulasi dan memberikan dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga akan berakibat pada terganggunya kelangsungan perkembangan kawasan secara menyeluruh, baik yang berwujud terganggunya kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

¹ Hery Sucipto & Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta Selatan: Grafindo Books Media, 2014), hal. 33-34

Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta aktif masyarakat yang bergiat di dalam kawasan yang nantinya direncanakan arah dan bentuk tata ruang terbuka hijau diharapkan dapat memberi kontribusi dalam setiap proses dan tahapan perencanaan RTH. Masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek, namun diharapkan dapat berpartisipasi sebagai subjek yang ikut memberi arah terbentuknya tata ruang hijau dalam bentuk dan skala masing-masing, sehingga pada saatnya produk RTH yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, karena timbulnya rasa memiliki dari keterlibatannya dalam proses perencanaan RTH. Harus pula disadari, bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam melakukan perencanaan RTH, harus dilihat dalam skala dan kedudukan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau dari keseluruhan arah dan bentuk penyediaan ruang terbuka yang harus direncanakan pada suatu kota, dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan tepat.²

Dengan demikian keberadaan ruang terbuka hijau akan berkaitan erat terhadap potensi spesifik pada masing-masing kawasan kota, serta harus pula diperhatikan peran fungsi yang diembannya, baik dari kedudukannya sebagai bagian dari ruang terbuka, maupun kedudukannya dalam rencana tata ruang, namun mempunyai potensi dalam memberi arah bagi keseimbangan kawasan baik kedudukannya sebagai fungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural, maupun fungsi ekonominya. Di setiap kota pengelolaan RTH minimal harus ada sekitar 30% dari Kawasan perkotaan, berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2025

² Prasetio Hadi Atmoko, "Strategi Penembangan Potensi Desa Brajan Kabupaten Sleman". Jurnal Media Wisata, Vol. 12 No. 12 November 2014.

memperbaharui struktur organisasi kementerian BPN untuk efisiensi birokrasi, mencakup Dirjen Tata Ruang hingga Pengendalian dan Penerbitan Tanah.³

Tapaktuan, sebuah kota yang kaya akan legenda dan keindahan alam di Aceh Selatan, memiliki Taman Pala sebagai salah satu ruang terbuka hijau yang penting. Taman ini bukan hanya berfungsi sebagai area rekreasi dan estetika kota, tetapi juga memiliki potensi ekologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Sebagai ruang terbuka hijau,

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pasal 2 menyebutkan: Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi: ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.⁴ Regulasi nasional ini diterjemahkan dalam konteks lokal melalui Peraturan bupati Aceh Selatan No 42 Tahun 2019 Tentang Penataan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Taman Pala berkontribusi pada kualitas udara, konservasi keanekaragaman hayati skala kecil, serta menjadi wadah interaksi sosial dan kegiatan komunitas.

Namun, pengelolaan ruang terbuka hijau seperti Taman Pala seringkali menghadapi berbagai tantangan. Pemeliharaan fasilitas, kebersihan, keamanan, serta penataan ruang yang optimal memerlukan perhatian dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Observasi awal menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan keamanan di Taman Pala Tapaktuan. Beberapa fasilitas public seperti area bermain anak, jalur pejalan

³ Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2025

⁴ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

kaki, dan penerangan jalan dalam kondisi kurang terpelihara, sementara minimnya fasilitas pendukung seperti toilet, tempat sampah, dan sistem penanda (*sign system*) menjadi kendala bagi kenyamanan pengunjung.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya gap antara fungsi ideal RTH sebagaimana diatur dalam regulasi implementasi di lapangan. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan RTH yang komprehensif, serta keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM, dan koordinasi antar stake holder) dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan RTH di Taman Pala Tapaktuan. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang mendalam mengenai bagaimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam tata kelola Taman Pala sebagai RTH, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi.

Sistem pemantauan dilakukan secara mingguan oleh Kepala Seksi Pertamanan dengan mengobservasi kondisi kebersihan, sarana prasarana, standar keamanan, dan pelayanan petugas. Pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap bulan dengan membandingkan target dan realisasi kegiatan, dibahas dalam rapat melibatkan pimpinan DLHK, dan dirumuskan rekomendasi tindak lanjut. Tindak lanjut evaluasi mekanisme tindak lanjut dilakukan melalui inventarisasi masalah, analisis solusi, penilaian ketersediaan anggaran, dan implementasi. Namun, implementasi sangat tergantung pada ketersediaan anggaran, sehingga banyak rekomendasi yang tertunda. Transparansi informasi tentang RTH Taman Pala dapat diakses melalui website DLHK dan Pemkab Aceh Selatan, dan tersedia saluran pengaduan publik.

Penelitian tentang RTH di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar fokus pada aspek perencanaan tata ruang, koordinasi antar dinas atau implementasi kebijakan secara umum. Sementara itu kajian yang secara spesifik menganalisis tata kelola RTH dari perspektif operasional yang mencakup pemeliharaan, pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam konteks Kabupaten masih terbatas. Terlebih lagi, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tata kelola RTH di Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki karakteristik unik baik dari segi regulasi daerah maupun konteks sosial budaya lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran empiris tentang bagaimana DLH mengelola RTH dalam praktiknya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH sebagai aset public yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ***“Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Pala Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan”***.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Fasilitas Sarana dan Prasarana yang kurang terpelihara
- 1.2.2 Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan
- 1.2.3 Sistem pemantauan dan evaluasi yang belum optimal

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan RTH di Taman pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan?

- 1.3.2 Bagaimana efektivitas pembiayaan pemeliharaan di Taman Pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan?
- 1.3.3 Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Taman pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan?
- 1.3.4 Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tata kelola RTH Taman Pala?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pemeliharaan RTH di Taman pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas pembiayaan pemeliharaan di Taman Pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan
- c. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Taman pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan
- d. Untuk menganalisis Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tata kelola RTH Taman pala

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature tata kelola lingkungan dalam konteks pengelolaan RTH di daerah.

- 2) Memperkaya kajian empiris tentang implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi DLH Kabupaten Aceh Selatan: Memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem tata kelola RTH Taman Pala, khususnya dalam aspek pemeliharaan, pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah: Menyediakan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran untuk pengembangan RTH di Kabupaten Aceh Selatan.
- 3) Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran public tentang pentingnya peran serta dalam menjaga kelestarian RTH sebagai aset public.

c. Manfaat Akademis

Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu tata kelola RTH, khususnya di wilayah Aceh atau daerah dengan karakteristik serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Konsep Tata Kelola (*Governance*)

2.1.1.1 Pengertian Tata Kelola (*Governance*)

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola atau *to manage* yang berarti mengatur, menyelenggarakan atau menjalankan, dan mengendalikan suatu pemerintahan, perusahaan, program atau proyek melalui suatu tatanan dan proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan adalah rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁵

Tatakelola (*governance*) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu *civil society*. *Governance* merupakan sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan stakeholder.

⁵ Basuki, *Administrasi Publik Telaah dan Teoritis*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hal.18.

Menurut Kaufmann tatakelola (*governance*) bersangkutan dengan tiga perspektif, yaitu:⁶ (a) proses dengan mana pemerintah suatu pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan diganti; (b) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (c) ruang publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Di dalam pengertian praktisnya, *governance* dimaknai sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Keputusan yang dimaksud dalam hal ini berupa kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan Pengelolaan DAS (PDAS) dan/atau kebijakan Pengelolaan SDA (PSDA). Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak, hal itu termasuk dalam lingkup pengertian tatakelola (*governance*).

Good governance (tatakelola yang baik) didefinisikan sebagai sistem tatakelola yang mencakup tatacara, mekanisme, dan prosedur yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif berdasarkan prinsip-prinsip dan ukuran akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), transparan, efisien, efektif, dan integritas.⁷

Pengelolaan berarti perbuatan, cara atau proses mengelola, sedangkan mengelola berarti menyelenggarakan atau menjalankan, mengurus dan

⁶ Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). *Governance matters VIII: Aggregate and individual governance indicators, 1996–2008*. World Bank Policy Research Working Paper No. 4978.

⁷ Jefri, *Teori Stewardship dan Teori Governance*, (Economics Bosowa Journal, 2018), hal. 27.

mengendalikan. Pengelolaan merupakan upaya pengorganisasian sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Pengertian pengelolaan dapat disamakan dengan pengertian. Manajemen didefinisikan sebagai rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan untuk menetapkan dan mencapai tujuan organisasi atau institusi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

2.1.1.2 Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan dimaknai sebagai kumpulan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi atau kegiatan (birokrasi pemerintahan, perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain) yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Terdapat empat fungsi utama dari pengelolaan yaitu:⁸

1) *Planning* (perencanaan)

Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan pemilihan alternatif atau opsi terbaik;

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan,

⁸ *Administrasi Publik Telaah dan Teoritis*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 19-20.

menyediakan sarana prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada waktu yang sama tiap orang mendapatkan kepuasan kerja.

3) *Directing, Activating, Leading* (mengarahkan, menggerakkan, memimpin)

Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

4) *Controlling* (mengendalikan)

Mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai dengan rencana, Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga luaran maupun hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada fungsi kontrol ini termasuk kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja.

2.1.1.3 Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan bertujuan agar seluruh aset dan sumber daya yang tersedia dapat didayagunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh luaran (*output*) maupun hasil (*outcome*) yang diharapkan. Tujuan pengelolaan dapat dianggap tercapai atau berhasil apabila luaran maupun hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan 8 indikator tatakelola yang baik (*good*

governance), yaitu: berdasarkan hukum (*rule of law*), akuntabel, transparan, responsif, inklusif & berkeadilan, konsensus, partisipatif, efisien dan efektif.⁹

Setidaknya terdapat tiga tujuan umum dari pengelolaan sebagai berikut:¹⁰

- 1) Mewujudkan visi dan misi organisasi, institusi atau kegiatan;
- 2) Memelihara keseimbangan dan meredam konflik diantara tujuan-tujuan, kepentingan atau sasaran yang saling bertentangan di dalam organisasi;
- 3) Menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal.

Agar tujuan-tujuan pengelolaan tersebut dapat dicapai, diperlukan langkah-langkah manajemen sebagai berikut:¹¹

- 1) Menyusun strategi;
- 2) Membuat batasan wewenang & tanggung jawab, uraian tugas, dan daftar personil;
- 3) Menetapkan indikator, ukuran, target capaian, kriteria penilaian hasil & kualitas, dan batasan waktu;
- 4) Melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan rencana aksi;
- 5) Membuat Standar Prosedur Operasi (SPO);
- 6) Menetapkan standar kerja berbasis efisiensi dan efektifitas;
- 7) Membuat kriteria penilaian;
- 8) Melakukan kegiatan kontrol, monitoring dan evaluasi;

⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hal. 19.

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hal. 19

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hal. 19-20.

- 9) Pelaksanaan;
- 10) Melakukan benchmarking.

2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Tata Kelola (*governance*)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:¹²

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Prinsip-Prinsip Pemerintahan

- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Terdapat delapan indikator *good governance* yang meliputi: (a) Berdasarkan hukum (*rule of law*); (b) Akuntabel; (c) Transparansi; (d) Inklusif dan berkeadilan; (e) Partisipatif; (f) Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus; (g) Responsif; dan (h) Efisien & Efektif. Menurut Sedarmayanti terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- 2) Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- 3) Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

¹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hal.19.

- 4) Aturan Hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

2.1.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Tata Kelola (*Governance*) Lingkungan

2.1.2.1 Konsep Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan bersinonim dengan pengaruh. Pengaruh ialah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di lingkup masyarakat, maka pengaruh ialah daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Arti peranan secara implisit menggambarkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut. Menurut Soerjono Sukanto, unsur-unsur dari peranan yaitu: ¹⁴

- 1) Aspek dinamis dari suatu kedudukan
- 2) Seperangkat hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari suatu aktivitas yang dijalankan seseorang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.441.

Pentingnya peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat diantaranya pada hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- 1) Peranan tertentu harus dijalankan jika struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peranan sebaiknya dilekatkan pada individu yang dianggap mampu menjalankan, mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk menjalankannya.
- 3) Kadang kala individu dalam masyarakat tidak mampu menjalankan peranannya sebagaimana diharapkan, disebabkan pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan pribadi yang terlalu besar.
- 4) Apabila semua orang mampu menjalankan perannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang tersebut.

Mengenai peranan, Arimbi Horoeopetri dan Santosa, mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:¹⁶

- a) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mengemukakan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 442.

¹⁶ Arimbi Horoeopetri dan Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), hal.45.

bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat padatiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

- c) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini ialah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- e) Peran sebagai terapi, maksudnya bahwa peran dilakukan sebagai upaya mengobatill masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa peranan ialah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau

sekelompok orang untuk mendorong terjadinya suatu hal atau diartikan sebagai pola tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek.

2.1.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan

Lingkungan Hidup mempunyai tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup, yaitu bidang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan meliputi kebersihan, pertamanan, sanitasi, keindahan kota, penerangan jalan dan taman, penghijauan, pembibitan, dekorasi kota, reklame, rekomendasi perizinan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan menjalankan fungsi sebagai berikut :¹⁷

- a. Merumuskan kebijakan Bidang lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan, dan penegakkan hukum dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. Pembinaan pengendalian lingkungan hidup dan melaksanakan kajian dampak lingkungan;
- d. Pengelolaan keanekaragaman hayati
- e. Pembinaan pengumpulan limbah B3

¹⁷ <https://dlh.acehselatankab.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi> di akses 14 september 2020.

- f. Pengelolaan sampah di TPA/TPST
- g. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.1.3 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2..3.1 Pengertian dan Fungsi RTH

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.¹⁸

Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh vegetasi baik itu pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya. Kawasan ini didirikan berdasarkan kebutuhan dan peruntukkan dalam wilayah tersebut. Tidak hanya untuk menjaga dan menyeimbangkan kondisi lingkungan atau ekosistem sekitarnya, tetapi juga menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial yang memadukan dengan estetika alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau adalah

¹⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

ruang memanjang/ jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.¹⁹

Perencanaan RTH merupakan upaya luhur untuk menjaga kesinambungan antar generasi, sehingga diharapkan akan dapat diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran RTH pada masing-masing kawasan, secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai ruang terbuka hijau alami: berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional, maupun RTH nonalami atau binaan, sebagai hasil olah karya perencana tata ruang untuk mengalokasikan RTH nonalami. Pada dasarnya perencanaan RTH disusun sebagai upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan kota, sebagai upaya menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara ruang terbangun dengan RTH. Upaya ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 25, Ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Penataan RTH pada suatu kota, bertujuan untuk: ²⁰

¹⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

²⁰ Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta" *Journal of Rural and Development*, Volume 1 No. 1 Februari 2010, hal. 13.

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan/ binaan di wilayah perkotaan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

Dalam rencana tata ruang, maka kedudukan RTH merupakan ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan, yang tersusun atas RTH dan ruang terbuka nonhijau. Ruang terbuka hijau, memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota, yang direncanakan dalam bentuk penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi, agar dapat berperan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural, sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagai berikut:²¹

- a. Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro
- b. Fungsi sosial budaya; RTH diharapkan dapat berperan terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (*tetenger/ landmark*) kawasan.

²¹ Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau...", hal.14.

c. Fungsi arsitektural/estetika; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.²²

d. Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/pengunjung untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi

Bagi wilayah dengan ciri kekotaan kuat, senantiasa akan dihadapkan pada kondisi semakin menurunnya kualitas dan kuantitas RTH yang dapat dialokasikan, karena desakan pertumbuhan sarana dan prasarana kota, sebagai konsekuensi dari dinamika meningkatnya kebutuhan warga kota akan wadah kegiatan.²³

Manfaat yang diharapkan dari perencanaan RTH di Taman kota, adalah:²⁴

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas (citra) daerah
- b. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan
- c. Sarana rekreasi aktif dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial
- d. Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula

²² Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau...", hal.14.

²³ Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau...", hal.14.

²⁴ Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau...", hal.14.

- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- h. Memperbaiki iklim mikro, dan
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

2.1.3.2 Perencanaan dan Penataan RTH

Upaya perencanaan RTH dilakukan melalui pengaturan dan upaya untuk memberi arah pada berbagai kegiatan pembangunan, agar perubahan yang terjadi dapat berkembang pada kondisi yang lebih baik dari yang ada pada saat ini, sehingga pada akhirnya dapat memberi ciri yang spesifik dari sifat kehidupan kawasan yang mantap dan dinamis, namun tetap dapat menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka (hijau). Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang potensi yang selanjutnya akan menjadi RTH yang spesifik pada masing-masing kawasan, sehingga dapat menumbuhkan minat para pelaku pembangunan untuk berpartisipasi dalam pengembangan RTH kawasan yang bersangkutan.²⁵

Dalam perencanaan RTH, diupayakan untuk memperoleh masukan atas berbagai permasalahan yang secara spesifik terjadi pada setiap kawasan kota yang nantinya akan dialokasikan RTH, baik yang berupa karakteristik dan potensi kawasan, pengaturan penggunaan lahan dan pengalokasian ruang kawasan, penyempurnaan bentuk dan skala RTH, sisi kemanfaatan bagi warga kota, dan berbagai perencanaan vegetasi, dan instrumen pendukung sebagai bagian dari RTH, agar RTH dapat berperan lebih hidup untuk memberi manfaat optimal bagi kawasan maupun kota secara keseluruhan. Dengan

²⁵ Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau...", hal.16

demikian, perencanaan RTH tidak selalu dalam bentuk ‘mutlak’ hanya unsur vegetatif (pohon-pohon) saja, namun dapat diselipkan di dalamnya berupa sarana kegiatan untuk aktivitas pendukung yang lain, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk berbagai kemungkinan, tidak hanya dari sisi ekologis, namun juga dari sisi ekonomis, sosial budaya, dan arsitektural. Yang perlu menjadi penekanan, adalah dominasi unsur vegetatif, merupakan bagian utama yang perlu diperhatikan, yang membedakan dengan perencanaan ruang terbuka yang lain.²⁶

2.1.3.3 Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH

Perencanaan RTH pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, baik berupa lingkungan hidup maupun lingkungan binaannya. Tidak perlu dipersoalkan apakah RTH direncanakan pada suatu square (ruang terbuka) yang benar-benar masih kosong, ataupun penataan kembali RTH yang sudah ada dengan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, agar dapat lebih memberi manfaat bagi warga kota. Dalam konteks ini, yang harus menjadi pegangan adalah adanya peningkatan peran dan fungsi RTH, tidak hanya secara fisik dalam bentuk penambahan vegetasi dan instrumen pendukung yang lain, namun lebih dari itu harus dapat memberi stimuli pada kesadaran warga kota akan pentingnya RTH yang secara langsung dapat memberi tingkat kenyamanan lebih sebagai penyeimbang lingkungan terbangun.

Indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH)

²⁶ Samsudi, “Ruang Terbuka Hijau...”, hal.17.

a. Fasilitas

Fasilitas di atur dalam PERMEN PUPR No. 5/PRT/M/2008 tentang standar minimal fasilitas RTH yaitu toilet, tempat sampah, tempat duduk, jalur pedestrian. Fasilitas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Menurut Utama aspek fasilitas utama dan pendukung merupakan atribut fasilitas yang menjadi salah satu syarat didalam tata kelola Ruang Terbuka Hijau agar pengunjung dapat lebih menikmati alam ditengah kota dengan nyaman. Maka indikator yang digunakan adalah toilet, gazebo, tempat duduk, tempat ibadah, tempat sampah, papan petunjuk, dan jalur.²⁷

b. Aksesibilitas

Aksebilas diatur dalam PERMEN PUPR No 14/PRT/M/2017 tentang pedoman penyediaan aksebilas untuk difabel di ruang public. Aksesibilitas merupakan salah satu kriteria penting untuk kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Aksesibilitas dapat diukur dari gerbang masuk dan tempat parkir. Maka indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas aksesibilitas adalah lokasi, gerbang masuk dan tempat parkir.²⁸

c. Keamanan

Keamanan diatur dalam Permendagri No 180/2016 terkait standar pengamanan ruang public (CCTV, patroli, zonasi, aman). Keamanan atau keselamatan merupakan salah satu kriteria penting untuk kualitas RTH agar memberikan rasa aman kepada pengunjung. Faktor keamanan menurut Malek

²⁷ Marzuki dan dkk, "Linking NatureBased Tourism Attributes to Tourists Satisfaction", *An International Journal of Tourism and Hospitality Research*, (2017), 28:1, hal. 96-99

²⁸ Malek dan dkk, "Determinant Factor For Quality Green Open Space Assessment In Malaysia", *Journal of Design and Built Environment*, (2018), 18, (2), hal. 26-36.

dkk diukur berdasarkan penerangan. Berdasarkan Permenpar No. 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, keberadaan ruang maupun lapangan terbuka dapat menjadi titik kumpul saat terjadi bencana alam seperti gempa, sehingga diperlukan rambu titik kumpul untuk jalur evakuasi.²⁹

d. Rekreasi dan Bermain

Reaksi bermain diatur dalam PERMEN PUPR no 12/PRT/M/2019 terkait dengan standar arema bermain anak yaitu safety material, dan desain ramah anak. Indikator yang digunakan diukur berdasarkan kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu bermain, piknik, atau sekedar duduk-duduk santai. Jika banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat artinya masyarakat memiliki peluang cukup besar untuk memperoleh manfaat rekreasi, seperti relaksasi dan pemulihan. Menurut Ratnafury fasilitas relaksasi merupakan fasilitas untuk beristirahat seperti gazebo.³⁰ Gazebo menjadi fasilitas peristirahatan sambil menikmati keindahan panorama yang indah dan sejuk.

2.1.4 Kerangka Teori Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tata kelola (*Governance*) untuk menganalisis pengelolaan RTH Taman Pala oleh DLH Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 14 tahun 2022

²⁹ Dogrusoy, "Analysis Of Perceived Safety In Urban Parks: A Field Study In Büyükpark And Hasanağa Park", *Metu Jfa*, (2017),1, hal. 63.

³⁰ Ratnafury, "Analisis Fungsi Rekreasi di Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung: Studi Kasus Taman Lansia dan Teras Cikapundung", (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), hal. 17.

pengelolaan RTH mencakup tiga dimensi utama: pemeliharaan, pembiayaan, pemantauan serta evaluasi.

Ketiga dimensi ini dianalisis menggunakan prinsip-prinsip (*Good Governance*) yang meliputi: akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas dan partisipasi (PP No. 101 Tahun 2000).³¹

Hubungan antar konsep

- a. Tata kelola = Kerangka kerja utama
- b. Peran DLH = Aktor yang menjalankan
- c. RTH = objek yang dikelola
- d. Pemeliharaan, pembiayaan, pemantauan & evaluasi = dimensi operasional
- e. Prinsip *good Governance* = ukuran keberhasilan

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan di Taman Pala Indah Tapaktuan. Penelitian tentang RTH telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif, mulai dari aspek perencanaan tata ruang, koordinasi pemerintah, hingga peran dinas dan teknis dalam pengelolaan RTH. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengelolaan RTH di Indonesia, khususnya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi standar minimal 30% RTH dari luas kota/Kawasan perkotaan wilayah sebagai diamanatkan dalam UU No 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH . Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

³¹ P No. 101 Tahun 2000

2.2.1 Penelitian Pertama: Musliadi (2025) yang berjudul “*Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Kota Banda Aceh)*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana jaringan kebijakan berfungsi dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh, serta memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan yang ditanami dengan berbagai jenis vegetasi. Area ini berperan penting dalam menyediakan rasa aman, nyaman, segar, dan indah bagi masyarakat. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang bersifat alami dan komprehensif berdasarkan informasi dari lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan kebijakan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Hal ini dianalisis melalui teori Van Warden yang mempertimbangkan tujuh elemen, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Institusi Kelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, dan Strategi Aktor. Salah satu hambatan utama dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk mencapai 20% pada tahun 2029 adalah kurangnya anggaran pemerintah, yakni dana yang dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Meskipun setiap tahun ada pembelian lahan, tidak semua tanah yang diakuisisi diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau, karena penggunaan

lahan juga dialokasikan untuk keperluan pelebaran jalan, pembangunan pusat layanan, dan infrastruktur publik lainnya.³²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah ingin melihat Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian peneliti ingin melihat Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pada Taman Pala Tapaktuan Sebagai Ruang Terbuka Hijau yang menurut penulis sudah menjadi problem yang cukup serius dan perlu diteliti. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

2.2.2 Penelitian Kedua: Candra Agawan Situmorang dan dkk (2022) yang berjudul “*Koordinasi Pemerintah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado*”. Ruang Terbuka Hijau diartikan sebagai bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado hanya memiliki 21,27 persen, dimana sesuai aturan daerah harus memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pemerintah dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus penelitian dari teori T. Ndraha menggunakan 5 indikator, yaitu komunikasi antar anggota/institusi,

³² Musliadi, “Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Kota Banda Aceh)”, (Fak Ilmu Politik: Prodi Administrasi Negara, 2025), hal. v.

kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan komitmen, dan kontinuitas perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado telah berjalan dengan baik oleh masing-masing pihak, namun masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki mulai dari inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, peningkatan kompetensi partisipan dari sarana-prasana maupun skill/pengetahuan masing-masing pihak.³³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah ingin melihat Koordinasi Pemerintah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan penelitian peneliti ingin melihat Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pada Taman Pala Tapaktuan Sebagai Ruang Terbuka Hijau yang menurut penulis sudah menjadi problem yang cukup serius dan perlu diteliti. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dan metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

2.2.3 Penelitian Ketiga: Viranty Nur Ramdhanty dan dkk (2010) yang berjudul *“Peranan Dinas PUPR Bidang Tata Kota Kabupaten Barito Utara Dalam Pengelolaan Taman Kota Di Kota Muara Teweh”*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas

³³ Candra Agawan Situmorang dan dkk, “Koordinasi Pemerintah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado” Jurnal Governance Vol.2, No. 2, (2022), hal. 1

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Kota dalam pengelolaan taman kota di Kota Muara Teweh serta Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR Bidang Pertamanan dalam Pengelolaan Taman Kota di Kota Muara Teweh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas PUPR Bidang Pertamanan Kabupaten Barito Utara sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal, hal ini terlihat dari 4 indikator ,yaitu *equality* (kesetaraan), *consensus orientation* (kesepakatan Bersama, *participation* (partisipasi), dan *responsivenees* (responsivitas) sudah berjalan baik sejauh ini namun adanya hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR dalam pengelolaan taman kota ialah keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga terlatih.³⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah ingin melihat Peranan Dinas PUPR Bidang Tata Kota Kabupaten Barito Utara Dalam Pengelolaan Taman Kota. Sedangkan penelitian peneliti ingin melihat Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pada Taman Pala Tapaktuan Sebagai Ruang Terbuka Hijau yang menurut penulis sudah menjadi problem yang cukup serius dan perlu diteliti. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dan metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

³⁴ Viranty Nur Ramdhanty dan dkk, “Peranan Dinas PUPR Bidang Tata Kota Kabupaten Barito Utara Dalam Pengelolaan Taman Kota”, (Administrasi Publik: Universitas Islam Kalimantan, (2010), hal. 1.

2.2.4 Penelitian Keempat: Samsudi (2010) yang berjudul “*Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*”. Pada dasarnya perencanaan RTH merupakan bagian kecil dari upaya penyelamatan dunia seutuhnya, yang harus dipahami secara utuh. Perencanaan RTH harus didukung oleh semua pemangku kepentingan, karena pada dasarnya RTH merupakan upaya bentuk tanggung jawab antargenerasi yang harus dilakukan secara terlanjutkan. Seyogyanya setiap perencanaan RTH harus dipahami sebagai upaya bersama, yang terbebas dari berbagai kepentingan dan pamrih pribadi. Betapa indahnnya kota yang tumbuh dan berkembang dengan basis ekologis (ecocity) sebagaimana disampaikan Ebenezer Howard dua puluh tahun silam, melihat kekhawatiran akan semakin tersisih-kannya RTH di perkotaan. RTH akan menjadi mutiara berharga pada setiap bagian wilayah perkotaan, apabila dapat direncanakan bagi kesejahteraan warga kota, baik dari fungsi ekologis, ekonomis, sosial budaya, dan terancang secara estetik melalui sentuhan arsitektural yang bertanggung jawab terhadap terciptanya keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaannya secara terlanjutkan.³⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah ingin melihat Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan. Sedangkan penelitian peneliti ingin melihat Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pada Taman Pala Tapaktuan Sebagai Ruang Terbuka Hijau yang menurut penulis sudah menjadi problem yang cukup serius dan perlu diteliti. Adapun

³⁵ Samsudi, “Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta” *Journal of Rural and Development*, Volume 1 No. 1 Februari 2010, hal.19.

persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dan metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

2.2.5 Penelitian Kelima: Iqbal Nurhanafi dan dkk (tt) yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang*”. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau khususnya bagi publik di Kota Semarang sangatlah penting. Kondisi ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang 2012 baru mencapai 7,5% dari luas wilayah Kota Semarang, padahal sesuai amanat Undang-Undang setiap kota minimal harus mempunyai ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Berdasarkan uraian, penelitian ini membahas tentang Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang No14 Tahun 2011 tentang RTRW dan Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang di lapangan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif.³⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan RTH publik di Kota Semarang terdiri dari perencanaan,

³⁶ Iqbal Nurhanafi dan dkk, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang”, (Administrasi Publik: UNDIP, tt), hal.1.

pemanfaatan, dan pengendalian. Selain itu ditemukan beberapa faktor yang menghambat proses Implementasi RTH publik yaitu belum tercapainya 20% luas RTH publik, mahalnya harga lahan, kompetensi sumber daya manusia yang ada di SKPD terkait, komunikasi antar organisasi yang belum efisien dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan RTH publik. Disarankan Pemerintah Kota Semarang untuk mencapai target jangka pendek 20% luas RTH publik, negosiasi dengan masyarakat terkait harga lahan, memberi pelatihan tentang pelaksanaan penataan RTH publik, membuat aturan koordinasi yang fleksibel dan memberi informasi tentang RTH kepada masyarakat dan membuat kegiatan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan RTH publik di Kota Semarang.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah ingin melihat Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. Sedangkan penelitian peneliti ingin melihat Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pada Taman Pala Tapaktuan Sebagai Ruang Terbuka Hijau yang menurut penulis sudah menjadi problem yang cukup serius dan perlu diteliti. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dan metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Tabel 2.1 Matriks Kajian Terdahulu

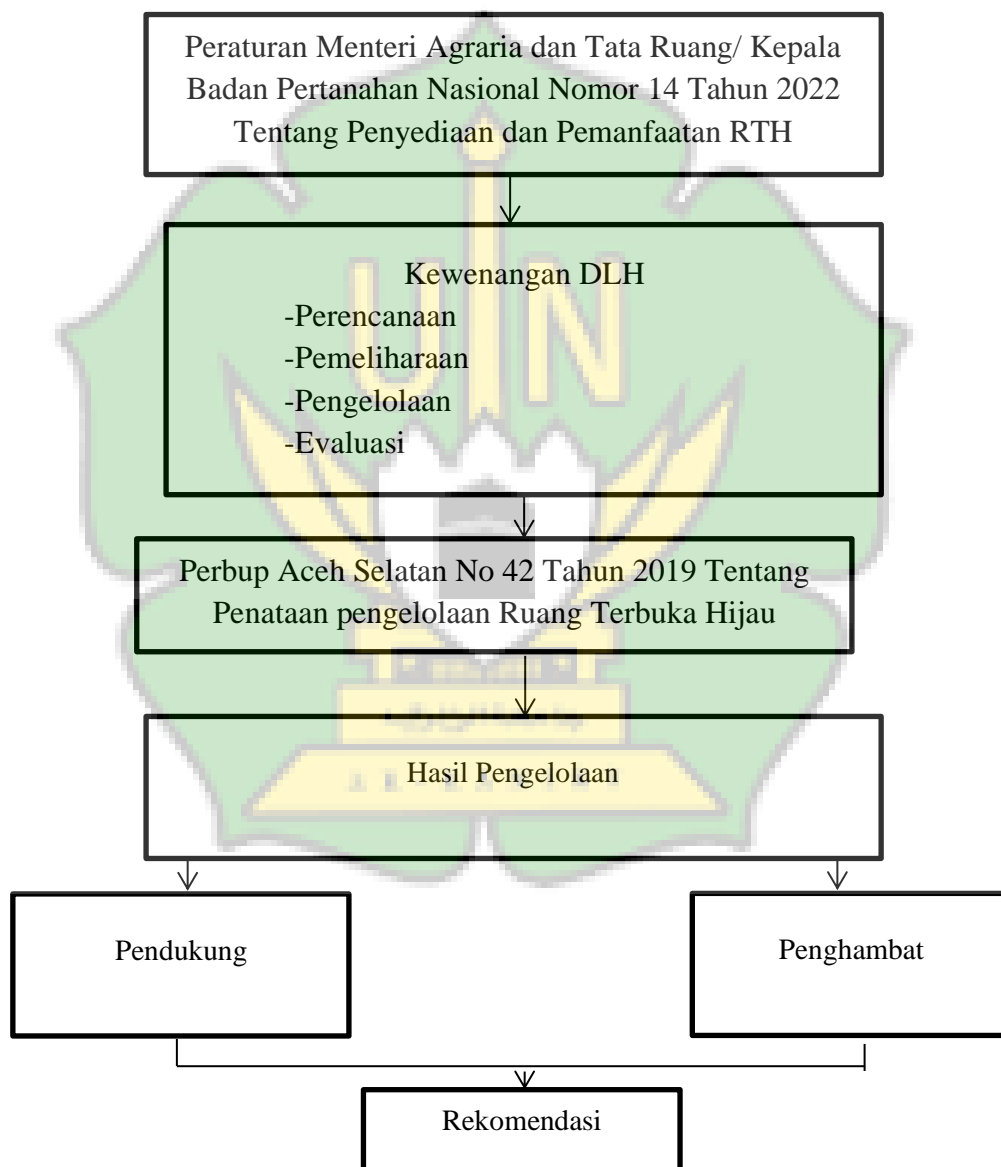
No	Penelitian & Tahun	Metode	Temuan Utama	Persamaan	Perbedaan
1	Musliadi (2025)	Kualitatif Deskriptif	Jaringan Kebijakan RTH belum optimal	Sama RTH di Aceh	Fokus jaringan kebijakan
2	Situmorang dkk (2022)	Kualitatif Deskriptif	Koordinasi baik tapi ada kendala	Fokus peran Pemerintah	Fokus koordinasi antar Dinas
3	Ramdhanty dkk (2010)	Kualitatif Deskriptif	Peran PUPR optimal	Fokus peran dinas	Dinas PUPR, bukan DLH
4	Samsudi (2010)	Kualitatif Deskriptif	RTH harus berbasis ekologis	RTH	Fokus konseptual
5	Nurhanafi (tt)	Kualitatif Deskriptif	RTH 7,5%, hambatan, lahan, SDM	Implementasi RTH	Fokus implementasi kebijakan

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, terlihat bahwa penelitian tentang RTH di Indonesia umumnya fokus pada aspek perencanaan, koordinasi antar dinas, dan implementasi kebijakan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji tata kelola RTH dari perspektif operasional dengan fokus pada tiga aspek utama: pemeliharaan, pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana DLH Kabupaten Aceh Selatan mengelola Taman Pala sebagai RTH dalam aspek operasional sehari-hari.

2.3. Kerangka Berpikir

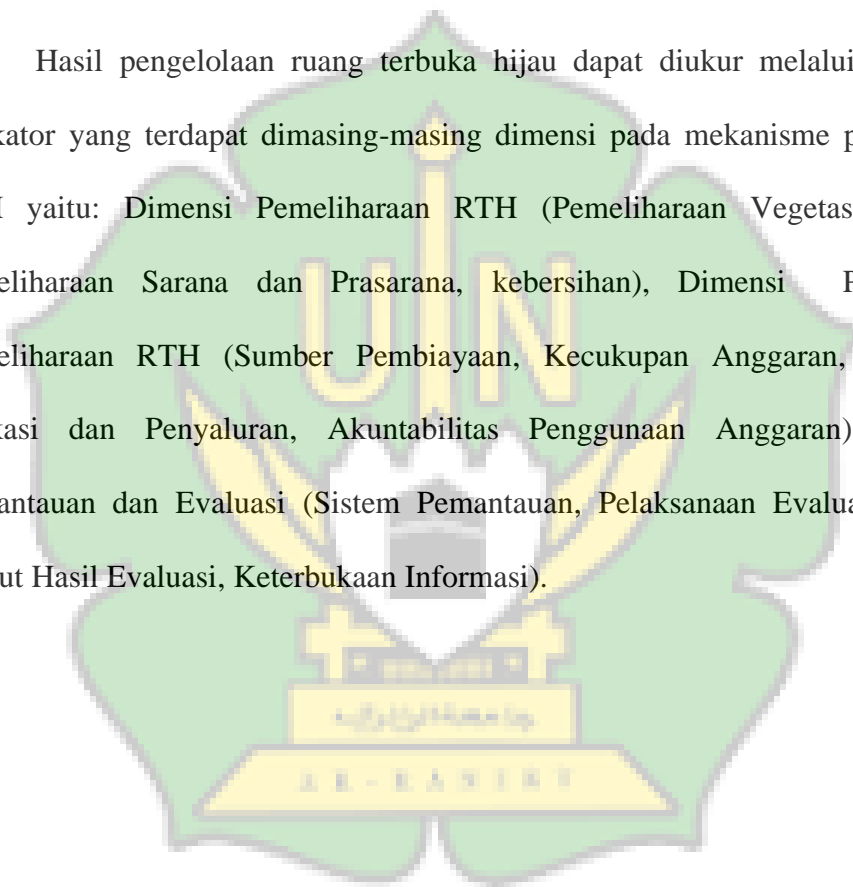
Untuk menemukan masalah yang diteliti, penting untuk memiliki gagasan yang merupakan landasan dalam meneliti masalah dengan tujuan untuk menemukan, menjelaskan dan memverifikasi kebenaran dari suatu penelitian.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam mengelola ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten. Mekanisme pengelolaan RTH menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 meliputi: pemeliharaan RTH, Pembiayaan pemeliharaan RTH, dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan RTH

Hasil pengelolaan ruang terbuka hijau dapat diukur melalui indikator-indikator yang terdapat dimasing-masing dimensi pada mekanisme pengelolaan RTH yaitu: Dimensi Pemeliharaan RTH (Pemeliharaan Vegetasi/Tanaman, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, kebersihan), Dimensi Pembiayaan Pemeliharaan RTH (Sumber Pembiayaan, Kecukupan Anggaran, Ketepatan Alokasi dan Penyaluran, Akuntabilitas Penggunaan Anggaran), Dimensi Pemantauan dan Evaluasi (Sistem Pemantauan, Pelaksanaan Evaluasi, Tindak Lanjut Hasil Evaluasi, Keterbukaan Informasi).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafah *post-positivisme*, yaitu yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci³⁷.

Pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang³⁸. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran, sifat-sifat serta hubungan atau gambaran, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki³⁹. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana yang menjelaskan bahwa metode deskriptif digunakan apabila penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan peristiwa atau kejadian dimasa sekarang⁴⁰. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran tentang tata kelola ruang terbuka hijau pada taman pala Tapaktuan Oleh Dinas Lingkungan Hidup.

³⁷Cresswell, *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*, (London: SAGE Publications, 1998), hal. 15.

³⁸Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 54.

³⁹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian, cet. III*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hal. 63.

⁴⁰Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsito, 2000), hal. 162.

3.2 Fokus Penelitian

Tabel 3.1
Dimensi dan indikator Penelitian

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1	Dimensi 1: Pemeliharaan RTH	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Vegetasi/Tanaman • Pemeliharaan Sarana dan Prasarana • Kebersihan dan pengelolaan sampah 	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Pasal 2 dan Pasal 4
2	Dimensi 2: Pembiayaan Pemeliharaan RTH	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Pembiayaan • Kecukupan Anggaran • Ketepatan Alokasi dan Penyaluran • Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Pasal 7-9
3	Dimensi 3: Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pemantauan • Pelaksanaan Evaluasi • Tindak Lanjut Hasil Evaluasi • Transparansi dan Partisipasi 	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Pasal 10-12

Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 (diolah).

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi utama:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan
Alamat lengkap: Jalan Teuku Cut Ali No. 95 Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
2. Taman Pala Tapaktuan
Alamat lengkap: Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Alasan Pemilihan Lokasi:

- a. RTH public utama di Tapaktuan
- b. Ikon wisata daerah
- c. Representatif untuk tata kelola RTH
- d. Memiliki permasalahan pengelolaan

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Oktober-September 2025

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴¹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan kunci. Data primer juga berupa hasil observasi langsung di lapangan juga dijadikan sumber primer guna mendukung hasil wawancara.

⁴¹Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 143.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.⁴² Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik informasi penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Adapun yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, berdasarkan pada pertimbangan informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan untuk mempermudah peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Adapun data yang ingin diperoleh dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari jajarannya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan, masyarakat sekitar, dan pengunjung Taman Pala.

⁴²Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... hal. 143.

Berdasarkan teknik purposive sampling tersebut, maka informan yang dipilih berjumlah 10 orang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah	Alasan Pemilihan (Justifikasi Purposive Sampling)
1	Informan Kunci	3 orang	Pemegang Otoritas
	- Kepala DLH	1 Orang	Sebagai pengambil kebijakan utama dan penanggung jawab program secara keseluruhan.
	-Kepala Bidang Terkait	2 Orang	Sebagai pelaksana teknis yang memahami langsung operasional dan kendala di lapangan.
2	Informan Pendukung	7 orang	Pengetahuan Lapangan
	- Staf Teknis DLH	2 Orang	Sebagai pelaksana harian yang berinteraksi langsung dengan kondisi Taman Pala.
	-Tokoh Masyarakat	2 Orang	Sebagai pihak yang mengetahui kondisi riil dan dinamika sosial di sekitar taman.

No	Kategori Informan	Jumlah	Alasan Pemilihan (Justifikasi Purposive Sampling)
	-Pengunjung Taman	3 Orang	Sebagai pengguna langsung yang dapat memberikan perspektif tentang kondisi fasilitas dan manfaat taman.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kajian kepustakaan dilakukan dalam pengumpulan data-data untuk landasan teoritis dengan cara menelaah buku-buku serta jurnal yang berhubungan dengan tata kelola ruang terbuka hijau pada Taman Pala Tapaktuan Oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan yang telah ditentukan, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan untuk mendapatkan data dalam penulisan ini.

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan. dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara.

3.6.2 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks. suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Kunci
Pemeliharaan RTH	Vegetasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal perawatan tanaman • Kendala pemeliharaan • Mekanisme penanganan
Mekanisme penanganan	Sarana & Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Aler perbaikan fasilitas • Waktu perbaikan • Kendala
Kebersihan	Jumlah petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem sampah • Target kebersihan
Pembiayaan	Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber dana selain APBD • Proses alokasi
Kecukupan	Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran cukup • Dampak keterbatasan • Prioritas
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggung jawaban • Audit

		<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi
Monitoring	Sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme • Frekuensi • Penanggungjawab
Evaluasi		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terakhir • Hasil • Laporan
Tindak Lanjut		<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme • Implementasi • Kendala
Transparansi		<ul style="list-style-type: none"> • Berbagi informasi • Partisipasi masyarakat • Keluhan

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu proses dimana data yang telah diperoleh, diidentifikasi dan dikategorisasikan kemudian disajikan dengan cara mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan merupakan tahapan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi akibat dan proporsi. Sedangkan verifikasi merupakan tahap untuk menguji kebenaran kekokohan dan kecocokannya.⁴³

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan pengecekan terhadap data untuk memenuhi nilai kebenaran dari data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Penelitian yang telah disajikan dideskripsikan, dikelompokkan, mengurutkan pandangan yang sama, dan membandingkan antara sumber-sumber sehingga dapat dipercaya oleh pembaca.

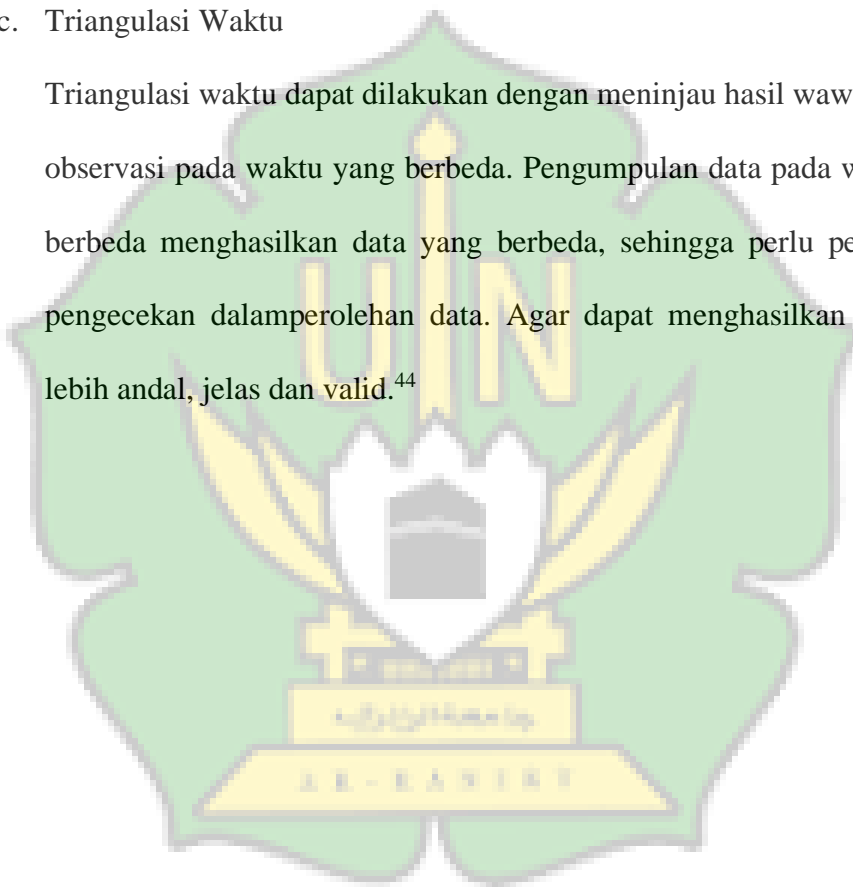
- b. Triangulasi Teknik

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian Reseach*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 4.

Triangulasi teknik berupa pengecekan dan membandingkan informasi data yang ditemukan dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang beda. Validasi yang dilakukan menggunakan hasil wawancara, selanjutnya membandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi survei yang berfungsi untuk menyatakan tingkat keakuratannya.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan meninjau hasil wawancara dan observasi pada waktu yang berbeda. Pengumpulan data pada waktu yang berbeda menghasilkan data yang berbeda, sehingga perlu pengulangan pengecekan dalam perolehan data. Agar dapat menghasilkan data yang lebih andal, jelas dan valid.⁴⁴



⁴⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D", 2017. hal 273

BAB IV

TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN PALA OLEH DLH KABUPATEN ACEH SELATAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Taman Pala Tapaktuan

Taman Pala merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang berlokasi strategis di pusat Kota Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Taman ini berfungsi sebagai ruang publik yang menyediakan area rekreasi, interaksi sosial, serta konservasi lingkungan bagi masyarakat Tapaktuan. Nama "Taman Pala" diambil dari tanaman pala (*Myristica fragrans*) yang menjadi komoditas unggulan daerah dan mencerminkan identitas khas Kabupaten Aceh Selatan.

Taman Pala memiliki berbagai fasilitas publik yang mendukung fungsinya sebagai RTH, meliputi: wahana bermain anak (ayunan, perosotan), MCK (Mandi Cuci Kakus), kursi taman, lampu taman, jalur pejalan kaki, gazebo, dan area terbuka hijau dengan berbagai jenis vegetasi. Lokasi Taman Pala yang strategis menjadikannya sebagai destinasi favorit masyarakat untuk bersantai, berolahraga, serta kegiatan keluarga, terutama pada akhir pekan dan hari libur.

Sebagai aset publik, Taman Pala diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis (penyeimbang lingkungan, penyedia oksigen, peneduh), sosial (ruang interaksi masyarakat, rekreasi), dan ekonomi (mendukung sektor pariwisata lokal). Namun, dalam perkembangannya, Taman Pala menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang.

4.1.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan, termasuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

DLHK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang, di antaranya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan. Di bawah bidang ini terdapat Seksi Pertamanan yang secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan RTH, termasuk Taman Pala. Seksi Pertamanan memiliki tugas utama dalam hal:

1. Perencanaan pengembangan dan pemeliharaan RTH;
2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan vegetasi dan sarana prasarana RTH;
3. Pengelolaan kebersihan dan estetika RTH;
4. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan RTH;
5. Pemantauan dan evaluasi kondisi RTH secara berkala.

4.2 Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pala Oleh DLHK

4.2.1 Dimensi Pemeliharaan RTH

4.2.1.1 Pemeliharaan Vegetasi/Tanaman

Pentingnya Pemeliharaan Vegetasi

Pemeliharaan vegetasi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan RTH karena tanaman adalah elemen utama yang memberikan manfaat ekologis seperti penyediaan oksigen, penyerapan karbon dioksida, peneduh, serta estetika lingkungan. Pemeliharaan vegetasi yang baik akan menjaga keberlanjutan fungsi RTH dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan serta Staf Teknis DLHK, pemeliharaan vegetasi di Taman Pala dilakukan secara rutin. Kegiatan pemeliharaan meliputi penyiraman tanaman, pemangkasan ranting dan daun yang tidak teratur, pemupukan, serta penggantian tanaman yang mati atau sakit. Rutinitas pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal operasional harian.

Penyiraman tanaman dilakukan setiap hari, baik pada pagi maupun sore hari. Pemangkasan dilakukan secara berkala tergantung kondisi tanaman dan kebutuhan estetika. Pemupukan juga dilakukan secara periodik untuk menjaga nutrisi tanaman agar tetap sehat dan subur.

Kendala Utama:

Kendala utama yang dihadapi dalam pemeliharaan vegetasi adalah wilayah kerja yang sangat luas tidak didukung oleh jumlah personil dan anggaran yang

memadai. Seksi Pertamanan harus mengelola seluruh RTH di Kabupaten Aceh Selatan, bukan hanya Taman Pala, dengan jumlah staf teknis yang terbatas.

Keterbatasan ini menyebabkan:

1. Intensitas pemeliharaan tidak merata: Tidak semua area Taman Pala dapat dijangkau dengan intensitas yang sama setiap hari.
2. Keterbatasan peralatan dan bahan: Pengadaan bahan pendukung seperti pupuk, pestisida, dan alat pemangkasan tergantung pada ketersediaan anggaran yang seringkali terbatas.
3. Produktivitas terhambat: Dengan personil yang terbatas, kegiatan pemeliharaan tidak dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan standar pengelolaan RTH modern.

Jenis Kegiatan	Frekuensi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Realisasi	Kendala
Penyiraman tanaman	Setiap hari	Pagi (07.00 WIB) dan Sore (16.00 WIB)	Staf Teknis DLHK	Terlaksana	Personil terbatas untuk area yang luas
Pemangkasan ranting/daun	Berkala (sesuai kebutuhan)	Tidak terjadwal pasti	Staf Teknis DLHK	Terlaksana	Ketergantungan pada kondisi tanaman dan ketersediaan waktu staf
Pemupukan	Periodik	Sesuai	Staf Teknis	Berkala	Keterbatasan

		kebutuhan tanaman	DLHK		anggaran untuk pembelian pupuk
Penggantian tanaman mati/sakit	Sesuai kebutuhan	Tidak terjadwal	Staf Teknis DLHK	Tergantung anggaran	Anggaran terbatas untuk pengadaan bibit baru

Tabel 4.1

Jadwal dan Rutinitas Pemeliharaan Vegetasi di Taman Pala

Sumber: Data primer, wawancara dengan Staf Teknis dan Kepala Bidang DLHK Kabupaten Aceh Selatan, 2025

4.2.1.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pentingnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam RTH yang mendukung fungsi sosial dan rekreasi bagi pengunjung. Fasilitas seperti wahana bermain anak, MCK, kursi taman, dan lampu taman harus dipelihara dengan baik agar dapat berfungsi optimal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pengguna RTH.

Temuan Lapangan

Taman Pala memiliki beberapa jenis sarana dan prasarana publik, namun kondisi sebagian besar masih kurang terpelihara. Observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan belum diperbaiki dalam jangka waktu yang cukup lama. Mekanisme perbaikan fasilitas yang rusak mengikuti alur kerja yang standar, yaitu dari penemuan masalah, pelaporan ke atasan, inventarisasi masalah, pencarian solusi, hingga perbaikan. Namun, kecepatan perbaikan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.

Proses pengadaan barang dan jasa harus melalui prosedur yang panjang sesuai dengan regulasi pemerintah, sehingga respons terhadap kerusakan fasilitas sering mengalami keterlambatan.

Tabel 4.2
Kondisi Sarana dan Prasarana Taman Pala Tapaktuan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Terakhir Diperbaiki/Diganti	Durasi Perbaikan
1	Wahana bermain anak (ayunan, perosotan, dll)	5 unit	Kurang terpelihara	Sebagian 2023	Berkisar 3-6 bulan
2	MCK (Mandi Cuci Kakus)	2 unit	Kurang terpelihara	2022	Sangat lama, menunggu anggaran
3	Kursi taman	15 unit	Kurang terpelihara	Sebagian 2023	4-6 bulan
4	Lampu taman	20 unit	Kurang terpelihara (8-10 lampu rusak)	2024	2-4 bulan per unit
5	Gazebo	4 unit	Kurang terpelihara	2022	Sangat lama, menunggu anggaran
6	Jalur pejalan kaki	±300	Cukup	2024	-

		meter	baik		
7	Tempat sampah	10 unit	Kurang memadai	Belum ada penambahan	-

Sumber: Data primer, observasi lapangan dan wawancara dengan DLHK, 2025

Analisis Mekanisme Perbaikan:

Meskipun mekanisme perbaikan sudah terstruktur (dari pelaporan hingga eksekusi), namun implementasinya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. Rata-rata durasi perbaikan fasilitas berkisar antara 2-6 bulan, bahkan ada yang lebih lama. Hal ini disebabkan oleh:

1. Keterbatasan anggaran: Anggaran yang dialokasikan terbatas, sehingga prioritas perbaikan harus dipilih dengan cermat.
2. Prosedur pengadaan yang panjang: Proses pengadaan barang dan jasa memerlukan dokumen yang lengkap dan persetujuan dari berbagai tingkat, sehingga memakan waktu.
3. Wilayah kerja yang luas: Dengan banyaknya RTH yang dikelola, fokus perbaikan terbagi antara lokasi-lokasi yang berbeda.

4.2.1.3 Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Pentingnya Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Kebersihan merupakan faktor penting dalam menjaga estetika dan kenyamanan RTH. Pengelolaan sampah yang baik akan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi pengunjung, serta mendukung fungsi ekologis RTH. Kebersihan RTH juga mencerminkan kualitas tata kelola yang dilakukan oleh pihak pengelola.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang dan Staf Teknis DLHK, pengelolaan kebersihan dilakukan secara rutin setiap hari. Kegiatan pembersihan mencakup pengambilan sampah, penyapuan area publik, dan pemeliharaan fasilitas kebersihan.

Namun, kendala yang dihadapi hampir sama dengan pemeliharaan sarana dan prasarana, yaitu wilayah kerja yang luas tidak didukung oleh jumlah personil dan anggaran yang memadai. Dengan personil kebersihan yang terbatas, kebersihan pada akhir pekan dan hari libur ketika jumlah pengunjung meningkat drastis, cenderung menurun. Banyak sampah yang berserakan, terutama di sekitar area bermain anak, pantai, dan gazebo.

Selain itu, jumlah tempat sampah yang tersedia (hanya 10 unit) tidak sebanding dengan luas Taman Pala dan jumlah pengunjung. Beberapa tempat sampah juga dalam kondisi rusak atau tidak memiliki tutup, sehingga sampah mudah tersebar akibat angin atau hewan.

Tabel 4.3
Tim dan Jadwal Kebersihan Taman Pala

Hari	Waktu Kerja	Jumlah Petugas	Area yang Dibersihkan	Kondisi Kebersihan	Kendala Utama
Senin - Jumat	06.00 - 10.00 WIB	2 orang	Seluruh area taman	Cukup baik	Personil terbatas untuk area yang luas

Sabtu - Minggu	06.00 - 12.00 WIB	2-3 orang (jika ada anggaran lembur)	Seluruh area taman	Kurang baik saat pengunjung banyak	Jumlah pengunjung tinggi, sampah bertambah cepat
-------------------	-------------------------	---	-----------------------	--	---

Sumber: Data primer, wawancara dengan Kepala Bidang dan Staf Teknis

DLHK, 2025

Ringkasan Dimensi Pemeliharaan:

Dimensi pemeliharaan RTH Taman Pala telah dilaksanakan secara rutin dalam tiga aspek: (1) pemeliharaan vegetasi/tanaman dilakukan setiap hari melalui penyiraman, pemangkasan, dan pemupukan berkala; (2) pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan melalui perbaikan dan penggantian fasilitas yang rusak, meskipun responsnya lambat karena keterbatasan anggaran; (3) pengelolaan kebersihan dilakukan setiap hari, namun kualitasnya menurun pada akhir pekan ketika pengunjung banyak. Kendala utama yang konsisten adalah wilayah kerja yang sangat luas tidak didukung oleh jumlah personil dan anggaran yang memadai, sehingga pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

4.2.2 Dimensi Pembiayaan Pemeliharaan RTH

4.2.2.1 Sumber Pembiayaan

Pentingnya Sumber Pembiayaan yang Stabil

Pembiayaan merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan RTH yang berkelanjutan. Tanpa sumber pembiayaan yang stabil dan mencukupi,

kegiatan pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan RTH tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLHK dan Kepala Bidang, sumber pembiayaan untuk pemeliharaan RTH Taman Pala sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Selatan. Hingga saat ini, belum ada sumber pembiayaan alternatif dari pihak swasta, program Corporate Social Responsibility (CSR), atau donasi masyarakat yang terstruktur.

Mekanisme Pengajuan Anggaran:

Mekanisme pengajuan anggaran untuk pemeliharaan RTH dilakukan melalui proses perencanaan dan penganggaran standar yang melibatkan berbagai tahap:

1. Tahap Perencanaan (Januari - Februari): Seksi Pertamanan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan pemeliharaan RTH di seluruh Kabupaten Aceh Selatan.
2. Tahap Pengusulan (Maret): RKA yang telah disusun diajukan ke Kepala Bidang, kemudian ke Kepala DLHK untuk mendapatkan persetujuan.
3. Tahap Pembahasan (April - Mei): RKA yang telah disetujui oleh Kepala DLHK diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Tahap Penetapan (Juni): Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran APBD.

5. Tahap Pencairan (Juli - Desember): Dana pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan DPA (Daftar Pemakaian Anggaran) dan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan.

Tabel 4.4
Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Anggaran RTH (2025)

Tahap	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab	Output
Perencanaan	Penyusunan RKA berdasarkan kebutuhan	Jan - Feb	Seksi Pertamanan	Dokumen RKA
Pengusulan	Pengajuan RKA ke Kepala DLHK	Mar	Seksi Pertamanan → Kepala Bidang → Kepala DLHK	RKA yang disetujui Kepala DLHK
Pembahasan	Pembahasan dengan Bappeda dan BPKD, penyesuaian anggaran	Apr - May	Kepala DLHK, Bappeda, BPKD	RKA yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah
Penetapan	Penetapan anggaran dalam Perbup Penjabaran APBD	Jun	BPKD, Sekretariat Daerah	Anggaran resmi yang dapat digunakan
Pencairan	Pencairan dana sesuai jadwal dan kebutuhan operasional	Jul - Des	Bendahara DLHK	Dana diterima untuk kegiatan pemeliharaan

Sumber: Data primer, wawancara dengan Kepala Bidang DLHK, 2025

Ringkasan:

Sumber pembiayaan RTH Taman Pala 100% berasal dari APBD Kabupaten Aceh Selatan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang terstruktur. Proses ini melibatkan Seksi Pertamanan, Kepala Bidang, Kepala DLHK, Bappeda, dan BPKD, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam proses ini seringkali terjadi penyesuaian (pengurangan) dari usulan awal karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan adanya prioritas pembangunan lain yang dianggap lebih mendesak.

4.2.2.2 Kecukupan Anggaran**Pentingnya Kecukupan Anggaran**

Kecukupan anggaran merupakan faktor krusial dalam menentukan kualitas pengelolaan RTH. Anggaran yang tidak mencukupi akan berdampak pada tidak optimalnya kegiatan pemeliharaan dan pengawasan RTH.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLHK dan Kepala Bidang, anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan RTH, termasuk Taman Pala, sangat tidak mencukupi kebutuhan riil di lapangan.

Pada tahun 2025, total anggaran untuk pemeliharaan seluruh RTH di Kabupaten Aceh Selatan adalah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Anggaran ini harus digunakan untuk pemeliharaan seluruh RTH di Kabupaten Aceh Selatan, bukan hanya Taman Pala. Padahal, berdasarkan perhitungan kebutuhan riil, anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan RTH secara optimal adalah

sekitar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun. Dengan demikian, terdapat gap anggaran sebesar Rp 50.000.000 (50 juta rupiah) atau 33% dari kebutuhan total. Gap ini semakin membesar dalam tiga tahun terakhir:

- 2023: Alokasi Rp 120 juta, kebutuhan Rp 150 juta (gap 20%)
- 2024: Alokasi Rp 110 juta, kebutuhan Rp 150 juta (gap 27%)
- 2025: Alokasi Rp 100 juta, kebutuhan Rp 150 juta (gap 33%)⁴⁵

Kekurangan anggaran ini berdampak langsung pada kualitas pemeliharaan RTH:

1. Pemupukan dikurangi frekuensinya: Tidak dapat dilakukan setiap 3 bulan, hanya 2 kali setahun.
2. Perbaikan fasilitas tertunda: Banyak fasilitas rusak harus menunggu berbulan-bulan karena anggaran tidak tersedia.
3. Penambahan petugas tidak dapat dilakukan: Meskipun jelas-jelas personil kurang, penambahan petugas tidak bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran.
4. Pengadaan fasilitas baru sangat terbatas: Tempat sampah, papan informasi, dan fasilitas lain tidak dapat ditambah karena anggaran terbatas.

Tabel 4.5
Perbandingan Kebutuhan Anggaran dan Alokasi Anggaran RTH (2023-2025)

Tahun	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Gap/Kekurangan (Rp)	Persentase Kecukupan	Dampak Kekurangan
--------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

⁴⁵ Data Skunder, Laporan Realisasi Anggaran DLHK Kabupaten Aceh Selatan

2023	150.000.000	120.000.000	30.000.000 (20%)	80%	Pemupukan dikurangi, perbaikan fasilitas tertunda
2024	150.000.000	110.000.000	40.000.000 (27%)	73%	Pemupukan hanya 2x setahun, banyak fasilitas rusak tertunda
2025	150.000.000	100.000.000	50.000.000 (33%)	67%	Pemeliharaan sangat terbatas, kondisi RTH menurun signifikan

Sumber: Data primer dan sekunder, wawancara dan dokumen perencanaan

DLHK, 2025

Ringkasan:

Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan RTH sangat tidak mencukupi kebutuhan. Gap anggaran sebesar Rp 50 juta (33% dari kebutuhan) menyebabkan banyak kegiatan pemeliharaan harus dikurangi intensitasnya atau ditunda. Gap ini juga menunjukkan tren yang semakin memburuk, dari 20% pada 2023 menjadi 33% pada 2025, menunjukkan bahwa masalah kecukupan anggaran semakin serius.

4.2.2.3 Ketepatan Alokasi dan Penyaluran Dana

Pentingnya Ketepatan Alokasi dan Penyaluran Dana

Meskipun anggaran yang dialokasikan terbatas, jika proses alokasi dan penyaluran dana berjalan dengan tepat waktu, kegiatan pemeliharaan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang dan Bendahara DLHK, proses alokasi dan penyaluran dana untuk pemeliharaan RTH secara umum sudah berjalan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam DPA (Daftar Pemakaian Anggaran) dinas.

Pencairan dana dilakukan secara bertahap:

- a. Tahap 1 (Juli): Pencairan untuk semester pertama (sekitar 40-50% dari total anggaran)
- b. Tahap 2 (Oktober): Pencairan untuk semester kedua (sisanya dari total anggaran)

Penyaluran dana ke lapangan juga mengikuti jadwal yang telah ditentukan, sesuai dengan kebutuhan operasional RTH.

Kendala yang Dihadapi:

Meskipun secara umum proses alokasi dan penyaluran berjalan baik, terdapat kendala yang sering terjadi keterlambatan amprahan (pengajuan pencairan dana dari pihak DLHK ke BPKD), sementara operasional di lapangan harus dilakukan sesuai jadwal. Keterlambatan amprahan dapat disebabkan oleh:

1. Kelengkapan dokumen administrasi: Dokumen pengajuan harus lengkap dan sesuai format yang ditentukan.
2. Proses verifikasi di BPKD: Dokumen harus diverifikasi oleh BPKD sebelum dana dapat dicairkan.
3. Kebijakan anggaran: Kadang ada perubahan atau penyesuaian kebijakan anggaran yang mempengaruhi jadwal pencairan.

Meskipun ada keterlambatan amprahan, namun realisasi penggunaan anggaran sangat baik, dengan tingkat realisasi di atas 95% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa DLHK mampu menyerap dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan dengan efektif.

Tabel 4.6
Alokasi vs Realisasi Anggaran RTH (2023-2025)

Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
2023	120.000.000	115.000.000	95,8%	5.000.000
2024	110.000.000	105.000.000	95,5%	5.000.000
2025	100.000.000	95.000.000 (s.d. Oktober)	95,0% (proyeksi)	5.000.000 (proyeksi)

Sumber: Data sekunder, laporan realisasi anggaran DLHK Kabupaten Aceh Selatan, 2025

Ringkasan:

Proses alokasi dan penyaluran dana untuk pemeliharaan RTH secara umum berjalan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam DPA. Meskipun ada kendala keterlambatan amprahan, realisasi penggunaan anggaran sangat baik (rata-rata 95%). Hal ini menunjukkan bahwa DLHK memiliki kemampuan manajemen anggaran yang cukup baik, meskipun anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan.

4.2.2.4 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Pentingnya Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas menjamin bahwa setiap rupiah yang berasal dari APBD digunakan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLHK, mekanisme pertanggung jawaban penggunaan anggaran disusun persemester dan diaudit akhir tahun oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), sesuai dengan Standar Pelaporan yang berlaku.

Setiap penggunaan anggaran didokumentasikan dengan lengkap, mulai dari bukti pembelian barang/jasa, kwitansi, hingga laporan kegiatan. Semua dokumen ini dikompilasi menjadi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala:

1. Pelaporan Bulanan: Laporan pertanggungjawaban bulanan disampaikan ke Kepala Bidang dan Kepala DLHK untuk monitoring dan evaluasi.
2. Pelaporan Semesteran: Laporan komprehensif disusun setiap akhir semester (Juli dan Januari) sebagai bahan evaluasi tengah tahun dan akhir tahun.
3. Audit Tahunan oleh BPK: Pada akhir tahun anggaran, seluruh laporan keuangan dan pertanggungjawaban DLHK diaudit oleh BPK untuk

memastikan kesesuaian dengan peraturan dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan DLHK dalam kategori baik, dengan tidak ada temuan signifikan mengenai penyimpangan penggunaan dana.

Transparansi ke Publik:

Terkait transparansi kepada publik, informasi tentang RTH Taman Pala terkait profil, anggaran, dan pelaksanaannya dapat diakses di website DLHK dan website Pemkab Aceh Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa DLHK sudah memiliki komitmen untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, meskipun detail tentang bagaimana publikasi dilakukan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Tabel 4.7
Mekanisme Akuntabilitas Penggunaan Anggaran RTH

Aspek Akuntabilitas	Mekanisme	Frekuensi	Penanggung Jawab	Status
Dokumentasi Penggunaan	Setiap pengeluaran didokumentasikan dengan bukti pembelian, kwitansi, laporan kegiatan	Setiap transaksi	Bendahara DLHK	Berjalan baik
Pelaporan Bulanan	Laporan pertanggungjawaban bulanan	Setiap bulan	Bendahara → Kepala Bidang → Kepala	Berjalan baik

			DLHK	
Pelaporan Semesteran	Laporan komprehensif	2x setahun (Juli, Januari)	Kepala DLHK → BPKD → BPK	Berjalan baik
Audit Tahunan	Audit oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)	1x setahun (Akhir tahun)	BPK	Berjalan baik
Transparansi Publik	Publikasi informasi RTH di website DLHK dan Pemkab	Berkelanjutan	DLHK	Sudah ada

Sumber: Data primer, wawancara dengan Kepala DLHK, 2025

4.2.3 Dimensi Pemantauan Dan Evaluasi

4.2.3.1 Sistem Pemantauan

Pentingnya Sistem Pemantauan

Sistem pemantauan merupakan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan pemeliharaan RTH berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan yang baik akan memungkinkan identifikasi masalah secara dini.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, pemantauan RTH Taman Pala dilakukan secara mingguan di bawah tanggungjawab Kepala Seksi Pertamanan. Pemantauan dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi taman untuk memeriksa kondisi RTH.

Yang Dipantau:

Aspek-aspek yang dipantau dalam setiap kunjungan pemantauan meliputi:

1. Kebersihan taman: Kondisi umum kebersihan, ada tidaknya sampah yang berserakan, kondisi tempat sampah.
2. Kondisi Saprass (Sarana dan Prasarana): Kondisi fasilitas-fasilitas seperti wahana bermain, MCK, kursi taman, lampu, gazebo, dan jalur pejalan kaki.
3. Standar keamanan: Keamanan fasilitas publik, potensi bahaya bagi pengunjung (fasilitas rusak yang bisa menyebabkan cedera).
4. Pelayanan petugas: Kinerja staf teknis dan petugas kebersihan dalam melaksanakan tugas mereka.

Sistem Pemantauan yang Terstruktur:

Meskipun pemantauan dilakukan secara mingguan, dokumentasi dan pelaporan hasil pemantauan mengikuti prosedur yang terstruktur. Hasil pemantauan dicatat dan dilaporkan untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi lebih lanjut.

Tabel 4.8
Jadwal dan Aspek Pemantauan RTH Taman Pala

Frekuensi	Penanggung Jawab	Yang Dipantau	Metode	Output
Mingguan	Kepala Seksi Pertamanan	Kebersihan, Saprass, Standar keamanan, Pelayanan petugas	Observasi langsung	Catatan pemantauan, identifikasi masalah

Sumber: Data primer, wawancara dengan Kepala Bidang DLHK, 2025

4.2.3.2 Pelaksanaan Evaluasi

Pentingnya Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan RTH untuk mengetahui sejauh mana target dan realisasi kegiatan tercapai. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis akan memberikan informasi penting untuk perbaikan dan pengembangan pengelolaan RTH.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLHK dan Kepala Bidang, evaluasi dilakukan persemester dengan melihat target dan realisasi kegiatan yang ada, kemudian dilakukan rapat untuk melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan.

Mekanisme Evaluasi:

1. Pengumpulan Data: Data tentang kegiatan dan hasil pemeliharaan RTH dikumpulkan setiap bulan.
2. Evaluasi Semesteran: Setiap akhir semester (Januari dan Juli), dilakukan evaluasi komprehensif dengan membandingkan target rencana dengan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Rapat Evaluasi: Hasil evaluasi dibahas dalam rapat yang melibatkan Kepala DLHK, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi Pertamanan.
4. Perumusan Rekomendasi: Dari rapat evaluasi, dirumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pengelolaan RTH.

Tabel 4.9
Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi RTH

Tahap	Kegiatan	Waktu	Output
Pengumpulan Data	Pencatatan kegiatan dan hasil pemeliharaan	Setiap bulan	Data bulanan
Evaluasi	Perbandingan target vs realisasi kegiatan	Akhir semester (Jan, Jul)	Laporan evaluasi
Rapat Evaluasi	Diskusi hasil evaluasi dan perumusan rekomendasi	Setelah evaluasi	Rekomendasi tindak lanjut
Tindak Lanjut	Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi	Sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran	Perbaikan pengelolaan RTH

Sumber: Data primer, wawancara dengan Kepala Bidang dan Kepala DLHK, 2025

4.2.3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pentingnya Tindak Lanjut Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan tahap implementasi dari rekomendasi yang dihasilkan dalam proses evaluasi. Tanpa tindak lanjut yang efektif, evaluasi hanya akan menjadi dokumen yang tidak berdampak pada perbaikan pengelolaan RTH.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang, mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan dengan cara menginventarisir semua

permasalahan dan kendala yang terjadi, mencari solusi penanganannya, dan melihat ketersediaan anggaran untuk mengimplementasikan solusi tersebut.

Proses Tindak Lanjut:

1. Inventarisir Masalah: Semua masalah yang teridentifikasi dari hasil pemantauan dan evaluasi dikompilasi dalam satu daftar.
2. Analisis dan Pencarian Solusi: Setiap masalah dianalisis untuk mencari solusi terbaik, baik itu perbaikan darurat, perbaikan berkala, atau pengembangan baru.
3. Penilaian Ketersediaan Anggaran: Solusi yang telah dirumuskan dikaji dari segi ketersediaan anggaran. Jika anggaran tersedia, solusi dapat langsung diimplementasikan. Jika tidak, solusi dijadwalkan untuk tahun anggaran berikutnya atau dimasukkan dalam prioritas pengajuan anggaran.
4. Implementasi dan Monitoring: Solusi yang telah disetujui diimplementasikan dengan monitoring berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya.

Tabel 4.10
Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RTH

Tahap	Kegiatan	Penanggung Jawab	Output
Inventarisasi	Kompilasi semua masalah dari hasil pemantauan dan evaluasi	Kepala Seksi Pertamanan	Daftar masalah lengkap

Analisis & Solusi	Analisis masalah dan perumusan solusi penanganan	Tim DLHK (Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf Teknis)	Daftar solusi dan rekomendasi
Penilaian Anggaran	Kajian ketersediaan anggaran untuk implementasi solusi	Kepala Bidang, Bendahara	Rencana implementasi berdasarkan ketersediaan anggaran
Implementasi	Pelaksanaan solusi yang telah disetujui	Staf Teknis DLHK	Hasil nyata dari perbaikan/pengembangan RTH

Sumber: Data primer, wawancara dengan Kepala Bidang DLHK, 2025

Dampak Keterbatasan Anggaran pada Tindak Lanjut:

Meskipun mekanisme tindak lanjut sudah ada, implementasinya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. Keterbatasan anggaran (seperti yang dijelaskan di sub-bab 4.2.2.2) menyebabkan banyak rekomendasi hasil evaluasi yang tidak dapat segera diimplementasikan. Rekomendasi harus diprioritaskan, dan yang dianggap paling mendesak (khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan publik) akan didahulukan.

4.2.3.4 Transparansi dan Partisipasi

Pentingnya Transparansi dan Partisipasi

Transparansi dan partisipasi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola yang baik. Transparansi memastikan bahwa informasi tentang pengelolaan RTH dapat diakses oleh publik, sementara partisipasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan RTH.

Temuan Lapangan - Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLHK, informasi tentang RTH Taman Pala terkait profil, anggaran, dan pelaksanaannya dapat diakses di website DLHK dan website Pemkab Aceh Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa DLHK sudah memiliki komitmen untuk membuka akses informasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga membuka saluran pengaduan untuk pelayanan public termasuk RTH Taman Pala, sehingga masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan keluhan atau saran tentang pengelolaan RTH.

Temuan Lapangan - Partisipasi

Terkait partisipasi masyarakat, partisipasi bersama dilakukan dengan gotong royong masal pembersihan Taman Pala antara masyarakat sekitar dan DLHK yang waktunya biasanya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan.

Program gotong royong ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH, meskipun belum dalam bentuk program terstruktur yang rutin. Kegiatan gotong royong biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang hari besar, event khusus, atau ketika ada kebutuhan pembersihan besar-besaran.

Tabel 4.11
Mekanisme Transparansi dan Partisipasi dalam Pengelolaan RTH Taman Pala

Aspek	Mekanisme	Status	Output
TRANSPARANSI			
Publikasi Informasi RTH	Website DLHK dan Pemkab Aceh Selatan	Sudah ada	Masyarakat dapat mengakses informasi profil, anggaran, dan pelaksanaan pengelolaan RTH
Saluran Pengaduan Publik	Saluran pengaduan pelayanan publik untuk RTH Taman Pala	Sudah ada	Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran tentang pengelolaan RTH
PARTISIPASI			
Gotong Royong Masyarakat	Program pembersihan bersama masyarakat dan DLHK	Ada (periodik)	Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan kebersihan RTH

Sumber: Data primer, wawancara dengan Kepala DLHK, 2025

Ringkasan Dimensi Pemantauan & Evaluasi:

Dimensi pemantauan dan evaluasi telah diimplementasikan oleh DLHK dengan mekanisme yang terstruktur. Pemantauan dilakukan secara mingguan, evaluasi dilakukan setiap semester, dan tindak lanjut dilakukan melalui mekanisme inventarisasi, analisis solusi, penilaian anggaran, dan implementasi. Transparansi juga sudah ada dengan publikasi informasi di website dan penyediaan saluran pengaduan publik. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui program gotong royong pembersihan. Meskipun demikian, implementasi tindak lanjut masih tergantung pada ketersediaan anggaran.

4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Tata Kelola RTH Taman Pala

4.3.1 Faktor Pendukung

Berdasarkan analisis temuan penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung tata kelola RTH Taman Pala:

1. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran yang Terstruktur

DLHK memiliki mekanisme perencanaan dan penganggaran yang jelas dan terstruktur, mulai dari penyusunan RKA, pengusulan ke pimpinan, pembahasan dengan Bappeda dan BPKD, hingga penetapan dan pencairan anggaran. Mekanisme ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan RTH.

2. Sistem Pemantauan yang Rutin

Pemantauan RTH dilakukan secara mingguan oleh Kepala Seksi Pertamanan, memastikan adanya kontrol berkala terhadap kondisi RTH. Sistem pemantauan ini memungkinkan identifikasi masalah secara dini.

3. Evaluasi Berkala

Evaluasi kinerja dilakukan setiap semester dengan melibatkan pimpinan DLHK, sehingga memungkinkan penilaian komprehensif dan perumusan rekomendasi perbaikan yang terukur.

4. Akuntabilitas Keuangan yang Baik

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang penggunaan anggaran didokumentasikan dengan lengkap, laporan disampaikan sesuai jadwal, dan audit dilakukan oleh Badan Pemriksa Keuangan. Tingkat realisasi anggaran

yang baik (di atas 95%) menunjukkan kemampuan DLHK dalam mengelola dana secara efektif.

5. Transparansi dan Saluran Komunikasi dengan Publik

DLHK sudah mempublikasikan informasi RTH di website resmi dan menyediakan saluran pengaduan untuk publik, memberikan akses bagi masyarakat untuk memantau dan memberikan masukan tentang pengelolaan RTH.

6. Keterlibatan Masyarakat

Adanya program gotong royong pembersihan yang melibatkan masyarakat menunjukkan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan dan keindahan Taman Pala, menjadi sumber daya tambahan bagi DLHK.

7. Lokasi Strategis

Lokasi Taman Pala yang strategis di pusat kota membuat taman ini menjadi fokus perhatian publik, sehingga potensi dukungan dari berbagai pihak cukup besar.

4.3.2 Faktor Penghambat

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat tata kelola RTH Taman Pala:

1. Keterbatasan Anggaran (faktor penghambat utama)

Anggaran yang dialokasikan (Rp 100 juta untuk seluruh RTH di Aceh Selatan) jauh lebih kecil dari kebutuhan riil (Rp 150 juta), menciptakan gap sebesar Rp 50 juta (33%).

No	Tahun Kebutuhan	Realisasi
1	2024-2025 (Rp 150 Juta)	50 Juta

Keterbatasan anggaran ini menjadi kendala utama dalam:

- a. Pemeliharaan fasilitas yang optimal
- b. Kecepatan perbaikan fasilitas rusak
- c. Pengadaan fasilitas baru
- d. Penambahan personil

2. Keterbatasan Personil

Jumlah staf teknis DLHK yang terbatas harus mengelola seluruh RTH di Kabupaten Aceh Selatan, menyebabkan beban kerja yang berat dan pemeliharaan yang tidak merata.

3. Wilayah Kerja yang Sangat Luas

Luasnya wilayah kerja Seksi Pertamanan menyebabkan fokus dan intensitas pemeliharaan di satu lokasi (seperti Taman Pala) menjadi terbagi.

4. Prosedur Pengadaan yang Panjang

Proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan berbagai tahap persetujuan menyebabkan keterlambatan perbaikan fasilitas yang rusak.

5. Ketergantungan 100% pada APBD

Belum ada sumber pembiayaan alternatif dari swasta atau CSR yang terstruktur, membuat pengelolaan RTH sangat rentan terhadap fluktuasi kemampuan keuangan daerah.

6. Kesadaran Masyarakat yang Masih Perlu Ditingkatkan

Meskipun ada program gotong royong, kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan fasilitas RTH masih perlu ditingkatkan.

4.3.3 Matriks SWOT Tata Kelola RTH Taman Pala

Berdasarkan identifikasi faktor pendukung dan penghambat, berikut adalah analisis SWOT:

Tabel 4.12

Matriks SWOT Tata Kelola RTH Taman Pala

STRENGTHS	WEAKNESSES
Mekanisme perencanaan & penganggaran terstruktur	Keterbatasan anggaran (gap 33%)
Sistem pemantauan mingguan	Keterbatasan personil
Evaluasi berkelanjutan (semesteran)	Wilayah kerja luas, fokus terbagi
Akuntabilitas keuangan baik (realisasi 95%+)	Prosedur pengadaan panjang
Transparansi (website, saluran pengaduan)	Ketergantungan 100% pada APBD
Partisipasi masyarakat (gotong royong)	Kesadaran masyarakat masih rendah
Lokasi strategis	
OPPORTUNITIES	THREATS
Kemitraan dengan swasta/CSR	Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan
Program adopsi taman oleh komunitas	Perubahan iklim ekstrem
Teknologi digital untuk sistem pemantauan	Tekanan pembangunan infrastruktur
Pengembangan Taman Pala sebagai ikon wisata	Ketergantungan anggaran rentan terhadap fluktuasi keuangan daerah
Dukungan akademis/penelitian	

Sumber: Data primer, analisis peneliti, 2025

4.4 PEMBAHASAN

4.4.1 Analisis Berdasarkan Prinsip Good Governance

Tata kelola RTH Taman Pala dapat dianalisis menggunakan lima prinsip utama *good governance*: akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi.

1. Akuntabilitas: BAIK

DLHK menunjukkan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangan dengan dokumentasi lengkap, pelaporan berkala, dan audit tahunan oleh BPK. Namun, akuntabilitas kinerja (hasil yang dicapai) masih terbatas karena sumber daya tidak mencukupi.

2. Transparansi: CUKUP BAIK

Informasi RTH sudah dipublikasikan di website dan saluran pengaduan tersedia. Namun, detail lebih lanjut tentang bagaimana publikasi dilakukan dan sejauh mana akses publik masih perlu dikonfirmasi.

3. Efisiensi: BAIK

DLHK menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 95%. Namun, efisiensi saja tidak cukup jika anggaran yang tersedia memang tidak mencukupi.

4. Efektivitas: SEDANG

Efektivitas pengelolaan RTH terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Banyak target pemeliharaan yang belum tercapai secara optimal karena gap anggaran dan personil yang terbatas.

5. Partisipasi: CUKUP BAIK

Masyarakat sudah terlibat melalui program gotong royong. Namun, partisipasi masih bersifat periodik dan belum terstruktur secara berkelanjutan.

4.4.2 Analisis Berdasarkan Teori Fungsi Pengelolaan

Dalam teori pengelolaan klasik, terdapat empat fungsi utama: Planning, Organizing, Directing, dan Controlling.

1. Planning (Perencanaan): BERJALAN BAIK
RKA disusun setiap tahun berdasarkan kebutuhan pemeliharaan RTH, menunjukkan perencanaan yang terstruktur.
2. Organizing (Pengorganisasian): BERJALAN BAIK
Struktur organisasi jelas dengan pembagian tugas yang terdefin antara Kepala Seksi, Kepala Bidang, dan staf teknis.
3. Directing (Pengarahan): TERBATAS
Pengarahan terbatas karena keterbatasan personil yang menyebabkan supervisi dan koordinasi tidak dapat dilakukan secara intensif.
4. Controlling (Pengawasan): BERJALAN BAIK
Sistem pemantauan mingguan dan evaluasi semesteran menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang berkala.

Kesimpulan: Tiga dari empat fungsi pengelolaan sudah berjalan dengan baik, namun fungsi directing masih terbatas karena keterbatasan personil.

4.4.3 Analisis Hubungan Antar Dimensi

Hubungan Dimensi Pemeliharaan dan Pembiayaan:

Kualitas pemeliharaan RTH (Dimensi 1) sangat bergantung pada ketersediaan pembiayaan (Dimensi 2). Dengan gap anggaran sebesar 33%, banyak kegiatan pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara kedua dimensi, di mana keterbatasan pembiayaan langsung mempengaruhi kualitas pemeliharaan.

Hubungan Dimensi Pemeliharaan dan Pemantauan & Evaluasi:

Sistem pemantauan dan evaluasi (Dimensi 3) berguna untuk mengidentifikasi masalah dalam pemeliharaan (Dimensi 1). Namun, mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi juga bergantung pada ketersediaan anggaran, sehingga banyak rekomendasi evaluasi yang tertunda implementasinya.

Kesimpulan: Ketiga dimensi tata kelola RTH saling terhubung, dan keterbatasan pembiayaan menjadi faktor kritis yang mempengaruhi dimensi lainnya.

4.4.4 Kesimpulan Umum

Tata kelola RTH Taman Pala oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen dengan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, akuntabilitas keuangan, dan kontrol/pemantauan. Transparansi juga sudah ada dengan publikasi informasi di website dan penyediaan saluran pengaduan.

Namun, faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran (gap 33%), yang menyebabkan:

1. Pemeliharaan fasilitas tidak dapat dilakukan secara optimal

2. Perbaikan fasilitas rusak mengalami keterlambatan
3. Program pengembangan baru sulit direalisasikan
4. Penambahan personil dan pengadaan alat tidak dapat dilakukan

Dengan demikian, meskipun DLHK sudah melakukan upaya manajemen yang baik, hasil yang dicapai di lapangan masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya finansial. Peningkatan alokasi anggaran merupakan langkah krusial yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pemeliharaan RTH Taman Pala.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pala oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Selatan, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

5.1.1 Kesimpulan Umum Tata Kelola RTH Taman Pala

Tata kelola RTH Taman Pala oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang terstruktur dan mengikuti standar good governance. Namun, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, khususnya sumber daya finansial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa DLHK memiliki:

1. Mekanisme Pengelolaan yang Baik: DLHK telah memiliki sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi yang terstruktur dan mengikuti prosedur yang berlaku.
2. Komitmen terhadap Akuntabilitas dan Transparansi: Penggunaan anggaran didokumentasikan dengan lengkap, laporan pertanggungjawaban disampaikan secara berkala, dan audit dilakukan oleh BPK setiap tahunnya. Informasi tentang RTH Taman Pala juga dapat diakses melalui website DLHK dan Pemkab Aceh Selatan.

3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi yang Rutin: Pemantauan dilakukan mingguan dan evaluasi dilakukan setiap semester, memungkinkan identifikasi masalah secara dini dan perumusan rekomendasi perbaikan.
4. Partisipasi Masyarakat: DLHK sudah melibatkan masyarakat melalui program gotong royong pembersihan, meskipun masih bersifat periodik dan belum terstruktur secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dari perspektif sistem dan prosedur, tata kelola RTH Taman Pala dapat dikatakan cukup baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

5.1.2 Kesimpulan Khusus per Dimensi

A. Dimensi Pemeliharaan RTH: dilaksanakan namun tidak optimal

Pemeliharaan RTH Taman Pala dilaksanakan secara rutin dalam tiga aspek:

1. Pemeliharaan Vegetasi/Tanaman: Dilakukan setiap hari melalui penyiraman, pemangkasan berkala, dan pemupukan periodik.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Dilakukan melalui perbaikan dan penggantian fasilitas yang rusak, namun responsnya lambat karena prosedur pengadaan yang panjang dan keterbatasan anggaran.
3. Pengelolaan Kebersihan dan Sampah: Dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan, namun kualitasnya menurun pada akhir pekan dan hari libur ketika jumlah pengunjung meningkat drastis.

Kendala Utama: Wilayah kerja yang sangat luas tidak didukung oleh jumlah personil dan anggaran yang memadai, sehingga pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai standar yang diharapkan.

Kesimpulan Dimensi Pemeliharaan: cukup baik namun tidak optimal (realisasi ~60-70% dari standar ideal)

B. Dimensi Pembiayaan RTH: terbatas dan tidak mencukupi

Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Sumber Pembiayaan: 100% berasal dari APBD Kabupaten Aceh Selatan tanpa ada sumber pembiayaan alternatif dari swasta atau CSR yang terstruktur. Hal ini membuat pengelolaan RTH sangat rentan terhadap fluktuasi kemampuan keuangan daerah.
2. Kecukupan Anggaran: Anggaran yang dialokasikan (Rp 100 juta/tahun) jauh lebih kecil dari kebutuhan riil (Rp 150 juta/tahun), menciptakan gap sebesar Rp 50 juta (33%). Gap ini semakin membesar dari tahun ke tahun (2023: 20%, 2024: 27%, 2025: 33%).
3. Dampak Kekurangan Anggaran: Gap anggaran berdampak langsung pada kualitas pemeliharaan, termasuk pengurangan frekuensi pemupukan, keterlambatan perbaikan fasilitas rusak, tidak dapat menambah personil, dan keterbatasan pengadaan fasilitas baru.
4. Ketepatan Alokasi dan Penyaluran: Meskipun ada kendala keterlambatan amprahan, secara umum alokasi dan penyaluran dana sudah berjalan sesuai jadwal dengan realisasi penggunaan anggaran yang sangat baik (di atas 95%).
5. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran: Mekanisme pertanggungjawaban sudah baik dengan dokumentasi lengkap, pelaporan berkala, dan audit tahunan oleh BPK.

Kesimpulan Dimensi Pembiayaan: tidak mencukupi dan menjadi faktor penghambat utama. Gap anggaran sebesar 33% merupakan hambatan terbesar dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pemeliharaan RTH Taman Pala.

Peningkatan alokasi anggaran dari Rp 100 juta menjadi minimal Rp 150 juta per tahun, ditambah dengan eksplorasi sumber pembiayaan alternatif (swasta/CSR), merupakan langkah krusial yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pemeliharaan RTH Taman Pala secara berkelanjutan.

C. Dimensi Pemantauan dan Evaluasi: terstruktur namun tindak lanjutnya tergantung anggaran

Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Sistem Pemantauan: Pemantauan dilakukan secara mingguan oleh Kepala Seksi Pertamanan dengan mengobservasi kondisi kebersihan, sarana prasarana, standar keamanan, dan pelayanan petugas.
2. Pelaksanaan Evaluasi: Evaluasi dilakukan setiap semester dengan membandingkan target dan realisasi kegiatan, dibahas dalam rapat melibatkan pimpinan DLHK, dan dirumuskan rekomendasi tindak lanjut.
3. Tindak Lanjut Evaluasi: Mekanisme tindak lanjut dilakukan melalui inventarisasi masalah, analisis solusi, penilaian ketersediaan anggaran, dan implementasi. Namun, implementasi sangat tergantung pada ketersediaan anggaran, sehingga banyak rekomendasi yang tertunda.

4. **Transparansi:** Informasi tentang RTH Taman Pala dapat diakses melalui website DLHK dan Pemkab Aceh Selatan, dan tersedia saluran pengaduan publik.
5. **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat terlibat melalui program gotong royong pembersihan, meskipun belum terstruktur secara berkelanjutan dengan jadwal rutin.

Kesimpulan Dimensi Pemantauan dan Evaluasi: cukup baik namun efektivitas tindak lanjut terbatas oleh anggaran. Sistem pemantauan dan evaluasi sudah berjalan dengan baik, namun dampaknya pada perbaikan nyata di lapangan masih terbatas karena keterbatasan anggaran untuk implementasi rekomendasi.

5.1.3 Analisis Berdasarkan Prinsip Good Governance

Tata kelola RTH Taman Pala menunjukkan penerapan prinsip-prinsip good governance dengan penilaian sebagai berikut:

Prinsip	Penilaian	Keterangan
Akuntabilitas	BAIK	Pengelolaan keuangan terdokumentasi lengkap, laporan berkala, audit tahunan oleh BPK. Namun, akuntabilitas kinerja masih terbatas.
Transparansi	CUKUP BAIK	Informasi dapat diakses melalui website dan saluran pengaduan tersedia. Namun, perlu ditingkatkan frekuensi update dan detail informasi.
Efisiensi	BAIK	Realisasi penggunaan anggaran di atas 95%, menunjukkan efisiensi penggunaan dana yang ada.

		Namun, anggaran yang ada memang tidak mencukupi.
Efektivitas	SEDANG	Terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Banyak target pemeliharaan yang belum tercapai secara optimal.
Partisipasi	CUKUP BAIK	Masyarakat terlibat melalui gotong royong, namun partisipasi masih periodik dan belum berkelanjutan.

Kesimpulan Good Governance: Tata kelola RTH Taman Pala sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik pada aspek akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Namun, efektivitas masih terbatas karena keterbatasan sumber daya finansial.

5.1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung (7 faktor):

1. Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang terstruktur
2. Sistem pemantauan yang rutin (mingguan)
3. Evaluasi berkala (semesteran)
4. Akuntabilitas keuangan yang baik (realisasi 95%+)
5. Transparansi dan saluran komunikasi dengan publik
6. Keterlibatan masyarakat melalui gotong royong
7. Lokasi strategis di pusat kota

Faktor penghambat (6 faktor, dengan 1 faktor kritis):

1. Keterbatasan anggaran (faktor kritis): Gap Rp 50 juta (33%) menjadi hambatan utama
2. Keterbatasan personil dan beban kerja berat
3. Wilayah kerja yang sangat luas menyebabkan fokus terbagi
4. Prosedur pengadaan yang panjang menyebabkan keterlambatan perbaikan
5. Ketergantungan 100% pada APBD tanpa sumber alternatif
6. Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan

Kesimpulan Faktor Penghambat: Keterbatasan anggaran (gap 33%) merupakan faktor penghambat utama yang mengakibatkan semua dimensi tata kelola tidak dapat berjalan secara optimal.

5.2 Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah saran dan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola RTH Taman Pala:

5.2.1 Saran bagi DLHK Kabupaten Aceh Selatan

1. Pengajuan Anggaran yang Lebih Agresif

Rekomendasi Spesifik:

- a) **Penyiapan Data dan Justifikasi**
 - 1) Kumpulkan dan analisis data real kondisi RTH Taman Pala dan seluruh RTH di Kabupaten Aceh Selatan
 - 2) Hitung biaya riil pemeliharaan berdasarkan standar pengelolaan RTH yang berlaku (SNI, Permen LH, dll)
 - 3) Buat analisis dampak gap anggaran terhadap kualitas RTH dan kepuasan masyarakat

- 4) Dokumentasikan kendala-kendala operasional yang terjadi akibat keterbatasan anggaran

b) Pengajuan Anggaran ke Daerah

- 1) Ajukan proposal peningkatan anggaran RTH untuk tahun anggaran berikutnya kepada Bappeda dan Kepala Daerah
- 2) Tampilkan data konkret gap anggaran, prioritas kebutuhan, dan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat
- 3) Usulkan peningkatan bertahap: dari Rp 100 juta menjadi Rp 125 juta (2026) dan Rp 150 juta (2027)

c) Komunikasi dengan Stakeholder

- 1) Lakukan dialog dengan Kepala Daerah, DPRD, dan Bappeda untuk membahas pentingnya peningkatan anggaran RTH
- 2) Tunjukkan manfaat RTH untuk lingkungan, kesehatan, dan ekonomi daerah
- 3) Ajak DPRD menjadi advokat untuk peningkatan alokasi anggaran RTH dalam pembahasan APBD

Target: Peningkatan anggaran RTH menjadi minimal Rp 125 juta tahun 2026.

2. Eksplorasi Sumber Pembiayaan Alternatif

Rekomendasi Spesifik:

- a) Kemitraan dengan Sektor Swasta

- 1) Identifikasi perusahaan lokal yang memiliki program CSR dan minat pada lingkungan (perbankan, minyak kelapa sawit, perdagangan, dll)
 - 2) Tawarkan program kerjasama pengelolaan RTH (adopsi taman, sponsor pemeliharaan fasilitas, dll)
 - 3) Buat proposal kemitraan yang jelas dengan benefit dan tanggung jawab masing-masing pihak
 - 4) Target: Dapatkan dukungan CSR minimal Rp 20-30 juta per tahun
- b) Program Adopsi Taman oleh Komunitas
- 1) Identifikasi komunitas lokal (PKK, remaja masjid, sekolah, organisasi sosial, dll) yang bersedia mengadopsi bagian-bagian tertentu di Taman Pala
 - 2) Buat sistem manajemen yang jelas: masing-masing komunitas bertanggung jawab atas area tertentu (kebersihan harian, perawatan tanaman, dll)
 - 3) Sediakan dukungan DLHK berupa pelatihan, alat, dan bahan (pupuk, pestisida, dll)
 - 4) Target: Involve minimal 5-7 komunitas, setiap komunitas bertanggung jawab atas area ~500-1000 m²

2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Rekomendasi:

- a) Penjadwalan Kerja yang Lebih Efisien

- 1) Tinjau ulang jadwal kerja petugas kebersihan dan staf teknis agar lebih efisien dan efektif
 - 2) Pertimbangkan penambahan shift atau jadwal yang fleksibel pada akhir pekan dan hari libur ketika pengunjung meningkat drastis
 - 3) Buat sistem rotasi yang adil agar beban kerja distribusi merata
- b) Kolaborasi dengan Komunitas untuk Pemeliharaan
- 1) Manfaatkan program gotong royong lebih intensif dan terstruktur dengan jadwal yang rutin (misalnya, setiap 2 minggu atau 1 bulan)
 - 2) Identifikasi komunitas yang bisa membantu tugas-tugas rutin (pembersihan, penyiraman tanaman, pemeliharaan ringan, dll)
 - 3) Sediakan pelatihan dasar kepada komunitas tentang cara merawat RTH yang baik
 - 4) Target: Kurangi beban kerja DLHK minimal 20-30% melalui partisipasi komunitas
- c) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas
- 1) Selenggarakan pelatihan berkala kepada staf DLHK tentang manajemen RTH modern, teknik pertamanan, pengelolaan sampah, dll
 - 2) Tingkatkan keterampilan dan motivasi kerja staf melalui program insentif atau penghargaan kinerja
 - 3) Dorong staf untuk mengikuti sertifikasi pengelolaan RTH dari lembaga terkait

Hasil yang Diharapkan: Meningkatkan efektivitas pemeliharaan RTH dengan SDM yang lebih kompeten dan termotivasi

5.2.2 Saran bagi Pemerintah Daerah (Pekab Aceh Selatan)

1. Jadikan Pengelolaan RTH sebagai Prioritas Pembangunan

Rekomendasi

- a) Masukkan RTH dalam Prioritas Pembangunan
 - 1) Dalam RPJM dan RPJP Daerah, masukkan target peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sebagai salah satu prioritas pembangunan yang setara dengan sektor ekonomi lainnya
 - 2) Alokasikan anggaran RTH secara proporsional dengan kebutuhan riil, bukan hanya sisa anggaran yang tidak terdistribusi
- b) Kebijakan Pengelolaan RTH yang Jelas
 - 1) Buat Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan RTH yang jelas, komprehensif, dan mudah diimplementasikan
 - 2) Peraturan harus mencakup: standar pengelolaan, tanggung jawab DLHK dan stakeholder lain, mekanisme pembiayaan, partisipasi masyarakat, dll
 - 3) Perbup/Perda ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk peningkatan alokasi anggaran dan implementasi program pengelolaan RTH

2. Peningkatan Alokasi Anggaran RTH dalam APBD

Rekomendasi:

- a) Analisis Kemampuan Finansial Daerah
 - 1) BPKD bersama Bappeda melakukan analisis mendalam tentang kemampuan keuangan daerah dalam mengalokasikan anggaran lebih besar untuk RTH
 - 2) Identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dialokasikan lebih besar untuk RTH tanpa mengorbankan sektor lain
- b) Peningkatan Anggaran Bertahap
 - 1) tingkatkan alokasi anggaran RTH secara bertahap:
 - 2) Jika memungkinkan, lanjutkan peningkatan di atas Rp 150 juta untuk penambahan RTH baru
- c) Sinergi Anggaran
 - 1) Eksplorasi kemungkinan pendanaan RTH dari berbagai sektor SKPD yang terkait, bukan hanya dari DLHK
 - 2) Contoh: Dinas Pariwisata bisa mendukung pembangunan fasilitas wisata di RTH, Dinas Kesehatan bisa mendukung program kesehatan masyarakat melalui RTH.

5.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Lanjutan

Berdasarkan penelitian ini, berikut adalah rekomendasi untuk penelitian lanjutan:

1. Penelitian Multi-Stakeholder: Lakukan penelitian yang melibatkan perspektif dari berbagai stakeholder (masyarakat, pengunjung, komunitas,

swasta, LSM, dll) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengelolaan RTH.

2. Penelitian Komparatif: Lakukan penelitian komparatif tentang pengelolaan RTH di berbagai lokasi atau daerah untuk mengidentifikasi best practices dan model pengelolaan yang paling efektif.
3. Penelitian Longitudinal: Lakukan penelitian jangka panjang (3-5 tahun) untuk memantau perubahan dan dampak dari implementasi rekomendasi penelitian ini.
4. Penelitian Teknis: Lakukan penelitian mendalam tentang aspek teknis pengelolaan RTH, termasuk: teknik pertamanan yang sesuai dengan iklim lokal, teknologi pengelolaan sampah, sistem irigasi yang efisien, dll.
5. Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat: Lakukan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme, tantangan, dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH secara berkelanjutan.
6. Penelitian tentang Keberlanjutan Finansial: Lakukan penelitian tentang model-model pembiayaan RTH yang berkelanjutan (CSR, adopsi taman, donasi, penggalangan dana, dll) dan implementasinya di konteks lokal Aceh Selatan.

Penutup

Penelitian tentang Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pala oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan telah menghasilkan berbagai temuan

penting tentang sistem manajemen yang sudah ada, kendala-kendala yang dihadapi, dan peluang-peluang untuk perbaikan ke depan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DLHK sudah memiliki sistem manajemen yang cukup baik dan menerapkan prinsip-prinsip good governance, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya finansial, khususnya gap anggaran sebesar 33%.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi yang telah diajukan—terutama peningkatan alokasi anggaran, eksplorasi sumber pembiayaan alternatif, optimalisasi SDM, dan peningkatan partisipasi masyarakat—diharapkan kualitas tata kelola dan pemeliharaan RTH Taman Pala dapat meningkat secara signifikan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Tapaktuan.

Lebih lanjut, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan RTH di Kabupaten Aceh Selatan dan daerah-daerah lain yang memiliki tantangan serupa dalam pengelolaan RTH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arimbi Horoepoetri dan Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi. 2003.
- Basuki. *Administrasi Publik Telaah dan Teoritis*. (Depok: Rajagrafindo Persada. 2018.
- Burhan Bugin. *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2011.
- Cresswell. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications. 1998.
- Hery Sucipto & Fitria Andayani. *Wisata Syariah Karakter. Potensi, Prospek dan Tantangannya*. Jakarta Selatan: Grafindo Books Media. 2014.
- Jefri. *Teori Stewardship dan Teori Governance*. Economics Bosowa Journal. 2018.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI. 2008.
- Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- _____. *Metode Penelitian. cet. III*. Jakarta: Rajawali. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Sudjana. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito. 2000.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”. 2017.
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Penelitian Reseach*. Yogyakarta: Andi. 2004.

Jurnal/Artikel

- Candra Agawan Situmorang dan dkk. “Koordinasi Pemerintah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado” *Jurnal Governance* Vol.2. No. 2. 2022.
- Dogrusoy. “Analysis Of Perceived Safety In Urban Parks: A Field Study In Büyükpark And Hasanağa Park”. *Metu Jfa*. 1. 2017.

- Iqbal Nurhanafi dan dkk. “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang”. *Administrasi Publik: UNDIP*. Tt.
- Malek dan dkk. “Determinant Factor For Quality Green Open Space Assessment In Malaysia”. *Journal of Design and Built Environment*. 18. 2. 2018. .
- Marzuki dan dkk. “Linking NatureBased Tourism Attributes to Tourists Satisfaction”. *An International Journal of Tourism and Hospitality Research*. 28:1. 2017.
- Musliadi. “Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Banda Aceh. Studi Kasus: Kota Banda Aceh. Fak Ilmu Politik: Prodi Administrasi Negara. 2025
- Prasetio Hadi Atmoko. “Strategi Penembangan Potensi Desa Brajan Kabupaten Sleman”. *Jurnal Media Wisata*. Vol. 12 No. 12 November 2014.
- Ratnafury. “Analisis Fungsi Rekreasi di Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung: Studi Kasus Taman Lansia dan Teras Cikapundung”. *Doctoral dissertation*. Universitas Pendidikan Indonesia. 2017.
- Samsudi. “Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta” *Journal of Rural and Development*. Volume 1 No. 1 Februari .2010.
- Viranty Nur Ramdhanty dan dkk. “Peranan Dinas PUPR Bidang Tata Kota Kabupaten Barito Utara Dalam Pengelolaan Taman Kota”. *Administrasi Publik: Universitas Islam Kalimantan*. 2010.
- Yenny. ” Prinsip-Prinsip *Good Governance*”. *E-Journal Ilmu Administrasi Negara*. 1. 2. 2013.

Undang-undang

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Prinsip-Prinsip Pemerintahan

Web

- <https://dlh.acehselatankab.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi> di akses 14 september 2020.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1134/Un.08/FISIP/Kp.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian sarjana mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - belum adanya yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Curi dan Desain;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengalihan Keusahaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Penunjukan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Insidat Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Eselon Layanan Umum;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PD/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 03 Juni 2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
- KESATU** :
- Menunjuk dan mengangkat Saudara:
- Ferry Setiawan, S. E., Ak., M. SI**
 Untuk membimbing skripsi:
- Nama : **Ressa Kamal**
 NIM : **210802133**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
 Judul : **Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Pda Tapakuan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan**
- KEDUA** :
- Segala pembiayaan yang diadukan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 23 Juni 2025
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,

MUJI MULIA

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk disetujui dan ditandatangani;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2521/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/09/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Dimas Lingkungan Hidup, Kabupaten Aceh Selatan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210802133

Nama : REZA KAMAL

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jalan tapak tuan-Medan Mahkamah Rantau Binuang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU PADA TAMAN PALA TAPAKTUAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SELATAN**

Banda Aceh, 18 September 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Desember 2025



Surat Penelitian

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan kepala DLH, Dan Staff Teknis



Wawancara dengan Kepala DLH dan Kepala Bidang



Wawancara dengan Pengunjung Taman Pala



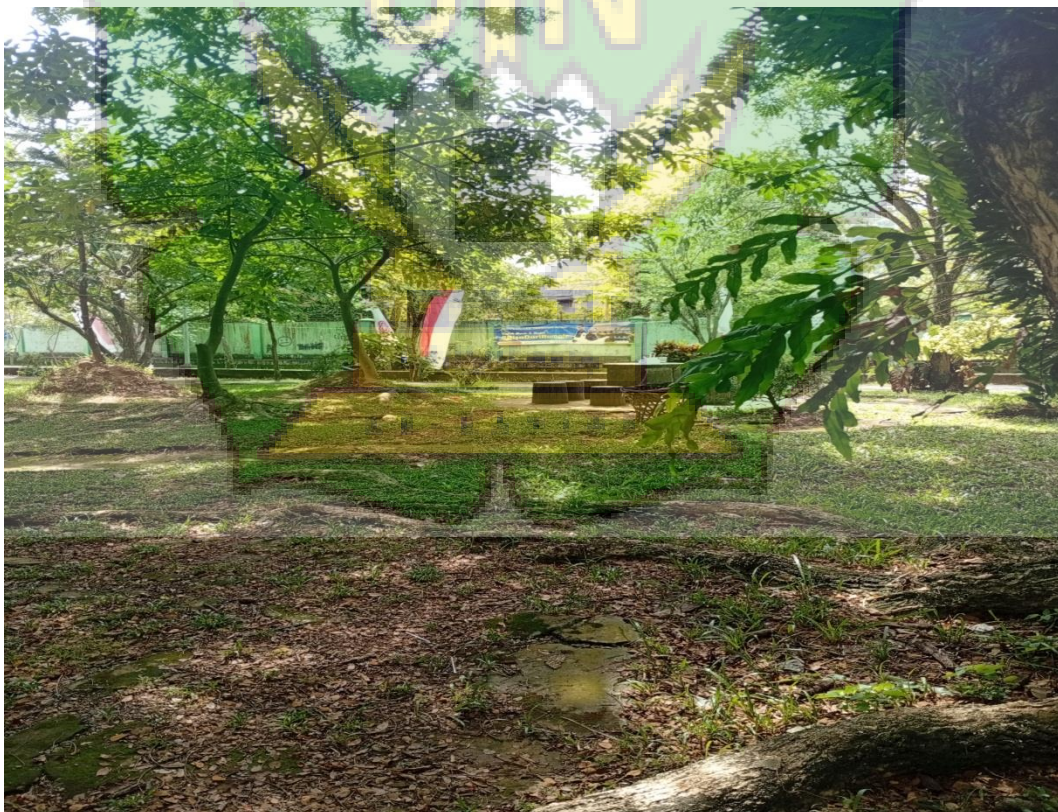
Wawancara dengan Pengunjung Taman Pala



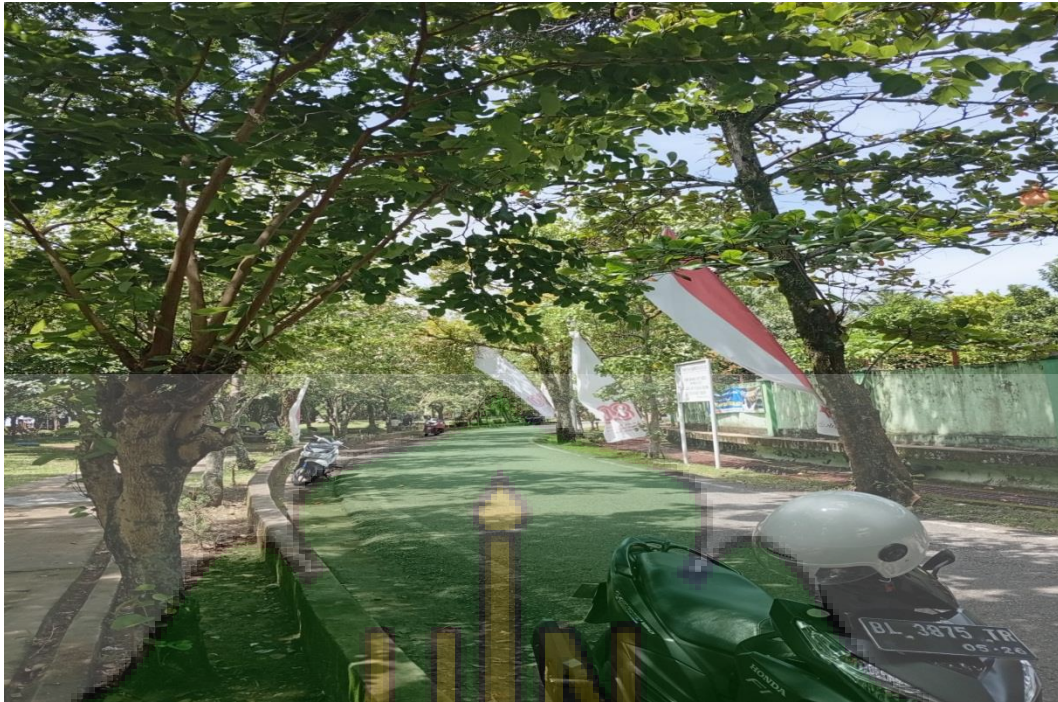
Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Kedaaan Taman Pala Tapaktuan



Keadaan Taman Pala Tapaktuan



Keadaan Taman Pala Tapaktuan

BIOGRAFI PENULIS

1. Nama : Reza Kamal
2. Tempat/Tgl Lahir : Rantau Binuang, 04 Mei 2003
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Hp : 085394563874
7. Email : rezakamal623@gmail.com
8. Instagram : Reyzakamal
9. Facebook : -
10. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
11. Alamat : Rantau Binuang, Kluet Selatan, Aceh Selatan
12. Pekerjaan : Mahasiswa
13. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Racip Redha (Alm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Hermida
 - d. Pekerjaan : -
 - e. Alamat : Rantau Binuang, Kluet Selatan, Aceh Selatan
14. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MIN Rantau Binuang Tahun 2015
 - b. SMP : MTsN Suak Bakong Tahun 2018
 - c. SMA : SMAN Suak Bakong 2021
 - d. Strata I (S1) : UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Banda Aceh, 15 Januari 2026
Penulis

Reza Kamal